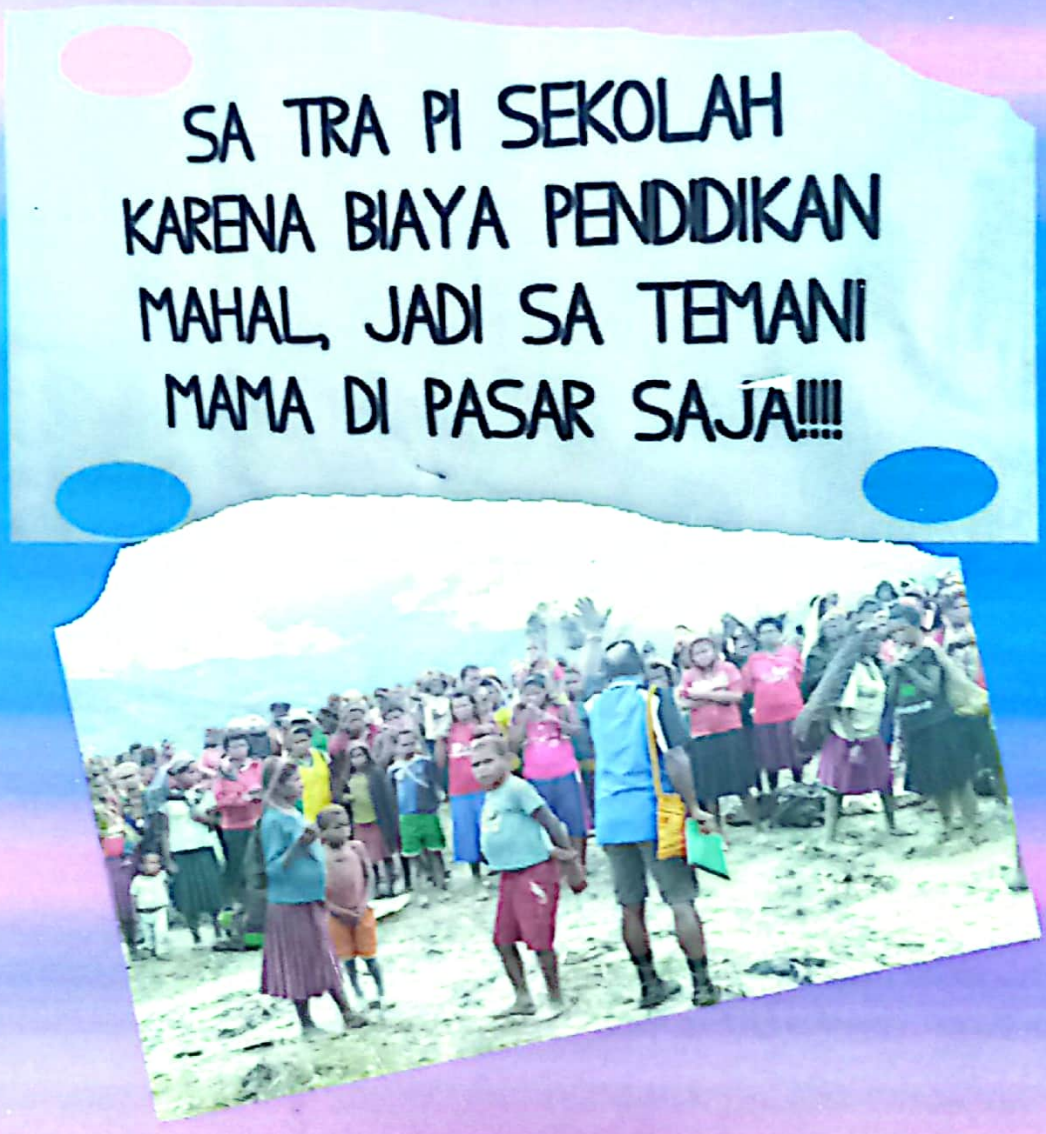
Seri Memoria Passionis No. 24

MEMORIA PASSIONIS DI PAPUA 2010

LINTASAN PERISTIWA HAM, POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, PENDIDIKAN, KESEHATAN SUMBER DAYA ALAM



Office For Justice, Peace
And The Integrity Of creation
Fransiskan Papua

Sekertariat Keadilan, Perdamaian
Dan Keutuhan Ciptaan
Fransiskan Papua

Dipindai dengan CamScanner

Daftar Isi

Kata Pengantar i

BAB I Hak-Hak Sosial dan Politik 1

A. Aspirasi Merdeka 1

B. Budaya, Seni dan Adat 13

C. Kebebasan Warga 15

D. Penyelenggaraan Pemerintah 21

E. Konflik, Damai, dan Rekonsiliasi 77

F. Otonomi Khusus (Otsus) 88

G. Pemekaran Wilayah 103

H. Pertahanan dan Keamanan 107

BAB II Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 122

A. Kesehatan 122

B. Kesejahteraan Umum 134

C. Pendidikan 145

D. Sumber Daya Alam 160

E. Perempuan atau Gender 170

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGATAR

Pada 2010, Sekretariat Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua mendokumentasikan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Dokumentasi ini masih sederhana namun beberapa hal yang penting telah dirangkum. Pokok hal yang menjadi perhatian adalah bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pendokumentasian ini, karena tidak disertai analisis peristiwa. Meskipun demikian "Realitas Papua 2010" tetap penting untuk menyediakan informasi yang kemudian diharapkan dapat berguna sebagai referensi di masa akan datang.

Potret berita ini dibagi beberapa bab dan setiap bab memuat pokok permasalahan yang berbeda-beda sesuai frekuensi masalah tersebut. Bab Pertama memuat hak-hak sosial dan politik. Kronologi tersebut terbagi dalam beberapa sub yakni kebebasan warga, pertahanan keamanan, penyelenggaraan pemerintahan, penanganan konflik, Aspirasi (Merdeka) dan pemekaran versus otsus. Bab kedua memuat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bab ini terbagi lagi dalam beberapa sub yakni hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, kesejahteraan umum dan pengelolaan sumber daya alam.

Situasi HAM tahun 2010 disimpulkan dalam beberapa pokok sebagai berikut [1] tanggapan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) atas kembalinya Nikolas Youwe (Tokoh OPM) dari Belanda. Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut menyesali sikap Nikolas yang menyatakan bahwa tidak ada negara asing yang mendukung perjuangan bangsa Papua Barat.[1] Sebelumnya diberitakan bahwa Nikolas Youwe yang berjuang untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora selama 46 tahun akan kembali ke Nusantara sebagai warga Negara Indonesia.[2] Kembalinya Nikolas Jouwe dari Belanda ditanggapi oleh Komite Nasional Papua Barat. Komite Nasional Papua Barat mengingatkan Nikolas tidak mematikan idiologi perjuangan

Dipindai dengan CamScanner

Papua.[3] [2] Komite Nasional Papua Barat cabang Biak melakukan aksi unjuk rasa menuntut referendum dengan membawa spanduk bertuliskan; "kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum".[4] Hal yang sama juga dilakukan Ratusan Massa West Papua Nation Autority (WPNA), dengan aksi menuntut kedaulatan Papua Barat.[5] Di pihak lain dari kesehatan, [3] Data Dinas Kesehatan Kota Jayapura, per September 2009 menemukan 43 warga terinfeksi HIV AIDS. Dan untuk menanggulangi penyebaran HIV AIDS maka Pemerintah Kota Jayapura berjanji mengoptimalkan kembali Peraturan Daerah HIV AIDS tahun 2007.[6] Sedangkan Kasus HIV di daerah Pegunungan Tengah saat ini masuk dalam siaga satu plus. Kurang lebih 500 kasus HIV rata-rata stadium 3-4 kategori AIDS. Per- September 2009 ada 78 kasus 50 kasus meninggal karena AIDS dan 28 sementara dirawat.[7] [4] Keputusan Gubernur no 195 tahun 2009 dan didukung Surat Edaran Walikota Jayapura No. 561 dan 150 tahun 2010 tentang Penetapan Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua, maka UMP Papua pertahun 2010 menjadi Rp 1.316.500 perbulan.[8] Hal ini seiring dengan harga kebutuhan pokok dan lainnya di Papua sangat tinggi karena Papua hanya menjadi daerah pemasaran. Oleh karena itu, menurut Berth Kambuaya, pemerintah pusat perlu mendirikan pusat-pusat produksi di Papua. secara terpisah, lebih lanjut Menko Perekonomian, Hatta Radjasa menilai pusat pertumbuhan ekonomi perlu dibangun di Papua. Ini penting agar ekonomi di Papua dapat meningkat karena berdasarkan laporan dari Gubernur Suebu sebagian besar dana, 15 triliun keluar dari Papua.[9] [5] Peristiwa penembakan kembali terjadi di areal Freeport. Penembakan ini dilakukan oleh orang yang tak dikenal yang menyebabkan 9 orang tertembak, 5 orang karyawan dan 4 anggota brimob.[10] Menanggapi kasus penembakan tersebut, DAP meminta TNI dan Polisi di sepanjang areal Freeport ditarik untuk sementara guna mencari tahu siapa pelaku penembakan tersebut sedangkan. Ketua

Dipindai dengan CamScanner

Komisi A DPR Papua, Ruben Magay mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkapkan pelaku penembakan di areal Freeport.[11] [6] Dalam acara rekonsiliasi Gerakan Demokrasi Aceh – Papua di Banda Aceh, Jeffrey Papare yang mewakili masyarakat sipil Papua menungkapkan bahwa masyarakat Provinsi Papua belum merasakan hasil Otonomi khusus (Otsus) yang diberlakukan pada tahun 2001. Berdasarkan data statistik pusat sekitar 81% masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan.[12] Menanggapi masalah dana otsus, DAP menilai dana Otsus digunakan sebagai alat politik dan kepentingan para pejabat.[13] Untuk menjawab setiap personalan seputar Otsus, Bupati Jayapura Habel Suwae mengatakan bahwa pembagian dana Otsus perlu dikaji ulang. Sebab, Otsus muncul karena tuntutan masyarakat Papua dan ada perkembangan pemekaran di Papua.[14] [7] Ketua Komisi A DPR Papua, Weynand Watory mengatakan pemekaran kabupaten di seluruh Tanah Papua berdampak buruk terhadap perkembangan penduduk Papua.[15] Di tengah kontroversi pemekaran, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah yang diketuai oleh Jhon Tabo menilai bahwa pemekaran Provinsi Pegunungan Tengah merupakan alternatif untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat.[16]

Pelbagai informasi tentang realitas Papua 2010 ini memang masih jauh dari sempurna namun harapan kami pelbagai informasi yang tertuang dalam buku ini dapat membantu kita untuk melihat setiap persoalah yang terjadi di Papua secara holistik dan menganalisanya dengan lebih objektif serta memberikan kontribusi yang tepat guna masa depan Papua.

Dipindai dengan CamScanner

[1] *http//tabloidjubi.com/daily-news/jayapura*

[2] *http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/01/12*

[3] *Bintang Papua, 15/01/10*

[4] *Bintang Papua, 03/10/10*

[5] *Bintang Papua, 23/10/10*

[6] *Papua Pos 07/01/2010*

[7] *Cenderawasih Pos 08/06/2010*

[8] *Bintang Papua 11/02/2010*

[9] *Cenderawasih Pos 04/09/2010*

[10] *Bintang Papua 26/01/2010*

[11] *Bintang Papua 27/01/2010*

[12] *Bintang Papua 09/01/2010*

[13] *Bintang Papua 04/03/2010*

[14] *Bintang Papua 21/05/2010*

[15] *Bintang Papua 06/01/2010*

[16] *Bintang Papua 08/02/2010*

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
HAK-HAK SOSIAL dan POLITIK

A. Aspirasi Merdeka

15 Januari
Kembalinya Nikolas Jouwe (Tokoh OPM) dari Belanda ditanggapi oleh KNPB. KNPB mengingatkan Nikolas tidak mematikan ideologi perjuangan Papua (Bintang Papua).

18 Januari
Warga Kabupaten Mimika berencana akan menggelar kegiatan long march dalam rangka memperingati meninggalnya Kelly Kwalik (Papua Pos).

27 Januari
Sebagai bentuk dukungan terhadap pendaftaran sekaligus peluncuran Internasional Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan Internasional Lawyers for West Papua (ILPW) di Brussel, Belgia, maka direncanakan sejumlah komponen masyarakat akan melakukan aksi di makam Theys Eluay (Bintang Papua).

28 Januari

- Dalam ziarah ke makam Theys Eluay, ada beberapa tuntutan dari warga yakni, menolak pembangunan Kodam baru di Papua, meminta agar semua militer baik organik maupun non organik ditarik dari tanah Papua dan meminta kepada Presiden Indonesia untuk membebaskan seluruh tahanan politik Papua yang berada di seluruh penjara di Indonesia. Hal yang sama dilakukan oleh warga di Mimika. Warga di Mimika menggelar long march dan ibadah bersama (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

- Pelaksanaan Konsultasi Publik Dialog Papua di Rumah Transit Baboiga Keuskupan Timika. Fasilitator Markus Haluk mengatakan dialog nasional yang akan dilaksanakan diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Papua. Lebih lanjut Markus Haluk sangat mengharapkan orang-orang yang diutus dalam dialog tidak boleh orang yang hidup dengan Miras dan berkeinginan memiliki uang (Papua Pos).

11 Februari
Pengobatan terhadap Fillep Karma ke luar Papua akhirnya terlaksana melalui program jamkesmas (Bintang Papua).

22 Februari
Instruksi perang yang disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 9 Februari 2010 di Markas Angkatan Laut Palembang dinilai oleh KNPB sebagai bentuk perlawanan terhadap perjuangan rakyat Papua melawan ketidakadilan (Bintang Papua).

1 Maret
Wirewit Study Centre menggelar seminar nasional sehari yang bertajuk "Makar suatu ungkapan kontravesi" di Aula STFT Fajar Timur (Bintang Papua).

3 Maret
Konferensi Pers yang digelar oleh KNPB di Jayapura mempertanyakan pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas terbunuhnya Panglima OPM Kelly Kwalik. Hal yang sama ditanyakan oleh masyakat Timika yang melakukan aksi damai. Mereka juga menolak dialog Papua – Jakarta (Bintang Papua).

5 Maret
Perjuangan masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI ternyata tidak mendapat dukungan dari dunia

Dipindai dengan CamScanner

internasional. Hal ini disampaikan oleh Nickolas Jouwe (Bintang Papua & Papua Pos).

6 Maret

Pernyataan yang disampaikan oleh Nickolas Jouwe tentang perjuangan Bangsa Papua ditanggapi oleh Ketua DPA, Forkorus Yaboisembut. Forkorus menilai pernyataan Nickolas tersebut hanya sebagai tameng agar dirinya dapat pulang kampung (Bintang Papua).

8 Maret

Komandan Satgas Koteka Zona Damai Perjuangan Papua Merdeka, Robert Takimai menilai Nickolas Jouwe adalah mafia yang memnggunakan suasana politik di Papua sebagai tempat untuk mencari makanan dan hidup (Bintang Papua).

13 Maret

- Ketua Umum KNPB, Buchtar Tabuni mengingatkan kepada sejumlah tokoh Papua agar segera menghentikan pernyataan yang mengatasnamakan rakyat Papua untuk mempertahankan PEPERA 1969 (Bintang Papua).
- Komisi Nasional HAM Papua menggelar diskusi yang bertemakan "Memaknai Dialog Papua-Jakarta dalam Perspektif HAM" (Papua Pos).

25 Maret

Mantan Wakil Menlu OPM, Nicholas Messet menanggapi aksi demo dari KNPB. Messet mengatakan Papua sudah final menjadi bagian dari wilayah NKRI (Papua Pos).

30 Maret

Empat terdakwa kasus pengibaran Bintang Kejora di Kapeso Mambramo Raya mulai disidangkan di Pengadilan Negeri

Dipindai dengan CamScanner

Jayapura (Bintang Papua).

10 Mei

Jaringan Damai Papua menggelar pra dialog Jakarta-Papua di Aula Sekolah Tinggi Filsafat-Teologi "Fajar Timur" (STFT "FT"). Sebagai pemateri, Pater Neles Tebay Pr, Muridan S. Widjojo dan Septer Manufandu. Peserta yang menghadiri pertemuan ini sekitar 50-an baik dari mahasiswa, aktivis LSM dan pemuda lainnya. Tujuan dialog adalah untuk memberikan pengertian baik bagi orang Papua dan pemerintah pusat tentang maksud dialog untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Papua secara damai (Cepos).

2 Juli

- Peringatan terakhir yang disampaikan Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe kepada OPM Puncak tidak dihiraukan oleh OPM. OPM ketika bersurat kepada Bupati Lukas Enembe menyebutkan bahwa mereka telah membentuk kebinet dan menolak berdamai dengan Indonesia (Bintang Papua & Cepos).
- Ketua I KNPB, Victor Yeimo dituntut 3 tahun penjara terkait kasus makar (Cepos).

13 Juli

Yusak Pakage yang ditangkap 6 tahun silam karena kasus makar mengibarkan Bintang Kejora di Lapangan Trikora akhirnya mendapatkan remisi bebas dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yusak menjalani masa tahanan selama 10 tahun (Bintang Papua & Cepos).

22 Juli

Sem Yaru dan Luther Wrait terdakwa kasus makar yang mengibarkan Bintang Kejora di halaman MRP dituntut 3 tahun penjara dalam sidang yang digelar (21/7). Hukuman untuk keduanya berbeda, Sem Yaru dituntut 3 tahun sedangkan

Dipindai dengan CamScanner

Luther Wrait dituntut 1 tahun 6 bulan (Bintang Papua & Cepos).

24 Juli

Viktor Yeimo yang dituntut 3 tahun penjara karena tindakan penghasutan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim, M Zubaidi Rahmat dalam sidang yang digelar di Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura (Bintang Papua & Cepos).

26 Juli

Penolakan Otsus yang kemudian memunculkan wacana referendum dinilai sebagai eforia berlebihan, karena Mahkamah Internasional telah mengakui Pepera 1969. Pernyataan ini disampaikan oleh eks tokoh OPM, Nichola Meset (Bintang Papua).

28 Juli

Pernyataan Nickolas Meset yang mengatakan bahwa Pepera sudah final dan diakui oleh Mahkamah Internasional ditanggapi oleh Juru bicara Political West Papua, Saul Bomoy bahwa pernyatan Nickolas Meset merupakan pembohongan terhadap perjuangan rakyat Papua Barat dan Nickolas Meset terpaksa karena dalam tekanan (Bintang Papua).

3 Agustus

Beberapa elemen Papua, DAP, KNPB, ICLWP, WPNA dan Tapol Napol menggelar aksi serimonial pengembalian Pepera dan Keputusan New Agrimen kepada PBB dengan membakar sebuah peti mati yang menyimbolkan Pepera dan Keputusan New Agrimen tersebut. Kegiatan ini dilakukan di Makam Theis Eluay. Sedangkan di Biak massa KNPB menggelar aksi demo ke DPRD Biak untuk menyampaikan aspirasi menggugat hasil Pepera 1969 yang dinilai cacat hukum (Bintang Papua).

4 Agustus

Dalam siaran pers yang digelar oleh Forum Rekonsiliasi Para

Dipindai dengan CamScanner

Pejuang Republik Papua Barat Merdeka Politikal Tapol Napol/OPM-TPN/RWP yang ditandangi oleh Fillep Karma, Buchtar Tabuni dan Saul J. Bomai menilai bahwa pemerintah pusat lambat menanggapi tuntutan penolakan Otsus dan mendesak DPRP menggelar sidang istimewa untuk mengakomidir tuntutan refrendum bagi Papua. Selain itu para pejuang Papua Merdeka kecewa terhadap DPRP yang membatalkan secara sepihak pertemuan untuk membahas penolakan Otsus. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut (Bintang Papua).

7 Agustus

Tim Rekonsiliasi Pemuda Papua Barat mendukung pertemuan Pasifik Island Forum di Negara Republik Kepulauan Vanatua yang berlangsung awal Agustus yang dihadiri 16 negara pasifik. Salah satu agenda yang dibahas adalah mendukung aspirasi masyarakat Papua untuk merdeka (Bintang Papua).

13 Agustus

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kasus makar yang menyeret 2 terdakwa yakni, Semuel Yeru dan Luther Wrait diputuskan oleh majelis hakim, Puji Wijayanto. Keduanya dihukum 1 tahun penjara (Bintang Papua).

18 Agustus

- Fillep Karma, napi kasus makar menolak pemberian remisi dari pemerintah terhadap dirinya (Bintang Papua).
- Pengibaran Bendera Bintang Kejora di Sentani mewarnai HUT RI ke 65 (Bintang Papua).

30 Agustus

Pendeta Sokrates Yoman meminta kepada semua pihak agar menghentikan stigmatisasi OPM, Makar dan Separatis terhadap orang Papua (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

2 September
Dewan Adat Papua menganggap Indonesia mencaplok Bangsa Papua Barat. Hal ini terungkap dalam demo damai di halaman kantor DPRP oleh masyrakat Papua yang tergabung dalam KNPB.Fokorus Yoboisembut mengatakan bahwa "kami datanguntuk memberi dukungan IPWP dan ILPW yang sudah mendapat sesi bicara dalam sidang umum PBB tahun 2010 yang akan dimulai 3 September 2010. Sekarang dunia sudah tahu dan materi gugatan aneksasi dan Pepera sudah siap." Sementara itu dalam orasi politik juga terungkap prinsip bangsa Papua dan komitmennya untuk memisahkan diri dari NKRI yang merupakan harga mati dan tidak perlu tawar-menawar. Kegiatan yang sama juga berlangsung di Wamena. Ketua KNPB wilayah Pegunungan Tengah Papua menilai persoalan Papua hanya dapat diselesaikan melalui jalur hukum international, bukan nasional (Cepos).

3 September
Aksi unjuk rasa menuntut referendum terjadi lagi. Kali ini oleh KNPB Biak. Para pendemo membawa spanduk bertuliskan; "kami rakyat Papua tolak dialog Jakarta-Papua dan minta referendum" (Bintang Papua).

23 September
Ratusan Massa West Papua Nation Autority (WPNA), mengelar aksi unjuk rasa menuntut kedaulatan bagi Papua Barat. Terianus Yoku, penanggung jawab Papua Merdeka sekaligus Presiden National Kongres Otoritas Papua Merdeka mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap dua perwakilah dari Papua dalam agenda di PBB. Ia juga menyinggung pelanggaran HAM (Naftali Kwan dan Septinus Kwan) serta Pepera yang cacat hukum (Cepos)

24 September
Komite Nasional Papua Barat dalam demo di Makam Theys

Dipindai dengan CamScanner

mengungkapkan bahwa 101 negara dari 199 negara yang menjadi anggota PBB siap memberikan dukungan terhadap refrendum di Papua. Lebih jauh nasib Papua akan divoting di PBB pada tahun 2011 (Bintang Papua).

1 Oktober

Komite Nasional Papua Barat akan tetap menggagas isu refrendum sebagai solusi terakhir bagi penyelesaian status pollitik bangsa Papua meskipun belum ada jawaban resmi dari kongres Amerika Serikat. Menurut Mako Tabuni, tanpa referendum masalah Papua mustahil dapat diselesaikan (Cepos).

4 Oktober

Franz Albert Yoku, Ketua Kelompok Independen pendukung Otsus dalam NKRI mengungkapkan bahwa adanya isu kongres AS mendukung Papua Merdeka adalah suatu kebohongan publik (Bintang Papua).

6 Oktober

- Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hotma Marbun menegaskan, di wilayah Papua tidak ada gerakan separatisme. Yang ada adalah kelompok tertentu yang mempunyai keinginan tertentu yang memegang senjata tanpa izin. Ini disebut kriminal dan pelanggaran hukum (Cepos).
- Duta Besar Amerika Serikat dalam kunjungannya ke Kodam, Polda dan DPRP Papua mengungkapkan dukungan pemerintah Amerika akan integritas Papua dalam NKRI. Dalam penjelasannya kepada Dubes AS, Kapolda Bekto Suprapto menjelaskan bahwa keadaan di Papua aman dan angka-angka statistik kejahatan di Papua rendah (Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

8 Oktober

- Kasus HAM menjadi alasan pro merdeka danmenuntut refrendum. Demikian diungkapkan oleh Franzalbert Yoku dan wakilnya Nicholas Messet dari Independent Group Supporting the Special Autonomous Region of Papua Within the Republic of Indonesia (IGSSARPRI). Kasus HAM ini berkaitan dengan keterlibatan militer TNI di dalamnya. Sementara itu Fokorus Yoboisembut mengungkapkan bahwa sidang itu sendiri diawali dengan penggambaran kekejaman militer RI yang terjadi di Papua (Bintang Papua).
- Budi Setyanto dari ICS mengharapkan agar pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap masalah Papua. Permasalah krusial berupa penolakan Otsus dan merdeka perlu disikapi secara cermat. Sikap yang reaktif yang disertai kekerasan justru akan membuat rakyat Papua semakin membenci pemerintah Indonsia (Cepos).

9 Oktober

Amerika Serikat memberikan deadline 2 tahun bagi Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua (Bintang Papua).

12 Oktober

Presiden SBY didesak menghadirkan tokoh pro merdeka maupun pro NKRI berbicara bersama guna mencari solusi bersama tanpa mengorbankan rakyat Papua. Bertolak dari kongres Amerika Serikat pada 22 September 2010, pemerintah Indonesia dianggap kecolongan. Kecolongan ini diakibatkan karena pemerintah sering menganggap isu-isu di Papua adalah hal yang biasa. Ketua KNPI Provinsi Papua, Yusak Andato juga menegaskan gerakan separatis tidak lagi bisa dilihat sebelah mata (Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

19 Oktober

- Pengibar Bendera Bintang Kejora, NA (43), SS (45), MW (40), FD (53), LA (43), DD (39), dan PR (27) terancam hukuman penjara seumur hidup. Mereka ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal primer 106 KUHP subsider pasal 110 ayat 2 poin 4e tentang Makar. Para tersangka mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Minggu, 10 Oktober 2010 dalam acara syukur di rumah seorang Ondoafi (Cepos).
- Belasan warga Kampung Ambora melarikan diri ke PNG karena takut dikerja oleh aparat keamanan. Hal ini merupakan buntut pengibaran Bintang Kejora di Kampung Ambora. Menurut salah seorang warga bernama Daud, kasus itu terjadi karena adanya provokasi dari beberapa oknum bahwa Papua akan merdeka sekembalinya Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut dari Amerika Serikat (Bintang Papua).

5 November

- Beberapa tokoh yang selama ini memperjuangkan hak-hak dan martabat orang Papua seperti: Rev. Edison Waromi (WPNA), Pdt. Herman Awom (Moderator Presidium DAP), Forkorus Yaboisembut (Ketua DAP), Eliezer Awom, Albert Kaliele dan Septinus Paiki (WPNCL) bersepakat membentuk dan mendeklarasikan Kepemimpinan Kolektif Nasional Bangsa Papua Barat (Cepos & Bintang Papua).
- Komite Nasional Papua Barat bertekad untuk bertemu dengan Presiden Barak Obama tanggal 9-10 November di Jakarta (Bintang Papua).

6 November

Eni Faleomavega terpilih sebagai Anggota Kongres Amerika

Dipindai dengan CamScanner

Serikat dari Sub Komisi Asia Pasifik. Hal ini membuat kelompok pro Papua merdeka merasa senang (Bintang Papua).

15 November
Rencana pembunuhan Ketua DAP, Forkorus Yaboisembut akhirnya terbongkar. Terbongkarnya rencana ini ketika 2 orang kelompok Petapa yakni Billy Suruan dan Yonathan Boy Kaway ke kediaman Forkorus dan mengungkapkan rencana tersebut (Cepos).

16 November
Rencana pembunuhan terhadap Ketua DAP Forkorus Yaboisembut diragukan. Menurut AB yang dituding membagi-bagikan uang kepada Petapa saat memberikan keterangan di Mako Polres Jayapura. Menurutnya Billy Suruan yang menerima uang tersebut adalah menantunya sehinnga AB hanya membantu Billy untuk membayar kredit motor di diler (Bintang Papua).

25 November
Berkas kasus 7 tersangka pengibaran Bintang Kejora telah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jayapura (Cepos).

27 November
Sebuah rumah di Worwana, Keerom diperiksa oleh aparat TNI. Diduga seorang gerakan separatis bersenjata, Lambertus Pekikir mendiami rumah tersebut (Cepos).

1 Desember
Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut menyeruhkan, pada hari kebesaran Bangsa Papua tidak ada yang mengibarkan bendera Bintang Kejora tetapi akan diadakan ibadah di makam Theys Eluay. Terkait dengan perayaan ini sebanyak 800 personel TNI dan Polri disiagakan di 48 titik di Jayapura (Bintang Papua & Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

2 Desember

Peringatan 1 Desember yang berpusat di Makam Theys Eluay, diisi dengan pidato dari Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut dengan menceritakan kembali sejarah Papua. Sedangkan di Sorong dipimpin oleh Sekretaris DAP Sorong, Yoab Satfle (Cepos).

6 Desember

Seby Sembom, tokoh separatis ditangkap di Bandara Udara Sentani ketika hendak melakukan perjalanan. Pihak kemanan dan kejaksaan berhasil mengamankan 1 buah leptop yang berisikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh TNI Polri di Papua (Bintang Papua).

15 Desember

Sekjen Dewan Komite Nasional Persiapan Kemerdekaan dan Kedaulatan Melanesia Barat, Melkianus Bleskadit ditangkap oleh polisi ketika membentangkan Bintang Kejora dan menyampaikan orasi politiknya di Jalan Percetakan Sanggeng Manokwari. Selain itu ada 7 aktivis yang lainnya juga ditangkap, Dance Yenu, dan 5 mahasiswa (Cepos).

17 Desember

- Meninggalnya Kelly Kwalik diperingati oleh warga Timika dengan Ibadah bersama. Menurut Koordinator KNPB wilayah Mimika, Vinsen Uniyoma bahwa DAP memutuskan tanggal 16 Desember sebagai hari peringatan atas kepergian Kelly Kwalik (Bintang Papua).
- Kasus pengerusakan fasilitas di Lapas Abepura oleh Buchtar Tabuni dan kawan-kawannya merupakan suatu tindak pidana baru. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Burnas (Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

B. Budaya, Seni dan Adat

6 Januari
Lembaga Masyarakat Adat Nduga akhirnya dikukuhkan dalam suatu prosesi adat yang dilakukan di Kota Kenyam. Jhon Beon dikukuhkan sebagai ketua LMA Nduga (Bintang Papua).

16 Januari
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Biak Numfor terus melakukan promosi investasi untuk mejadikan Biak sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Papua (Bintang Papua & Papua Pos).

20 Januari
Gubernur Barnabas Suebu berharap Badan Otoritas Adat Sentani yang didirikan pada September 2009 yang lalu dapat mengakomodir standar tatanan adat menyangkut adat Sentani dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan formal (Bintang Papua).

17 Juli
Lemabag Swadaya Masyarakat Napa Swandiwe Biak menggelar pesta budaya asli Biak di Pelabuhan Biak. Sejumlah tarian dan cerita yang digelar, menceritakan kehidupan masyarakat Biak waktu dulu (Cepos).

21 Juli
Pemerintah Daerah Kabupaten Biak memberikan perhatian serius terhadap penyusunan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelestarian dan penggalian nilai budaya (Cepos).

7 Agustus
Festival budaya Teluk Humbolt dilaksanakan selama 2 hari (6-7 Agustus 2010) (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

15 September
Potensi wisata Kota Jayapura menjanjikan namun pengelolaannya belum maksimal. Untuk itu pihak Dinas Pariwisata Kota Jayapura akan memanage potensi yang ada serta mempersiapkan objek dan jasa dalam bidang pariwisata (Cepos).

21 September
Potensi seni Papua harus dilestarikan dan dikembangkan. "Kekayaan akan potensi kesenian dan budaya Papua yang begitu banyak ini membutuhkan tangan-tangan terampil untuk memberdayakannya, " ujar Gubernur Papua, Barnabas Suebu (Cepos).

6 November
Pemerintah Provinsi Papua membentuk Badan Papua Tourism Board yang bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua untuk mengelola, menata dan mempromosikan potensi wisata yang ada di Provinsi Papua (Cepos).

9 November
Gubernur Papua, Barnabas Suebu membuka International Conference On Papua Cultural Diversity In The Mosaic Of Indonesian Cultures Location di Sasana Krida. Konferensi ini diikuti oleh 300 peserta termasuk 80 peserta dari luar negeri (Cepos).

11 November
Menurut Wulf Schienfenholel dari Max Institute Human Ethology Group Jerman yang pernah melakukan penelitian di Kampung Munggona, Lembah Pegunungan Bintang bahwa Papua adalah lumbung atau laboratorium budaya terlengkap di dunia (Cepos).

12 November

Dipindai dengan CamScanner

Konferensi Keanekaragaman Budaya Papua menghasilkan 42 rekomendasi. Intinya adalah bagaimana langkah-langkah yang harus diambil baik Pemrov Papua serta masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Papua (Cepos).

13 November
Dewan Adat Papua wilayah V Merauke dengan tegas menolak Program MIFEE. Penolakan ini dilakukan oleh 20-an orang dari DAP Merauke dengan cara melakukan aksi long march mengelilingi Kota Merauke (Cepos).

C. Kebebasan Warga

27 Januari
Sebanyak 18 narapidana Lapas Abepura dalam Januari ini bebas bersyarat karena masa hukumnya sudah berakhir (Papua Pos).

3 Februari
Solidaritas HAM dan Demokrasi Papua bersama dengan aktivis HAM Papua lainnya menggelar unjuk rasa ke Kantor Departemen Hukum dan HAM Provinsi Papua. Mereka menyampaikan aspirasi tentang pelanggaran HAM yang terjadi (Papua Pos).

17 Februari
Para korban pelanggaran HAM di Papua yang tergabung dalam SPKPHP mendatangi Kantor Departemen Hukum dan HAM Papu untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran HAM dan membicarakan kondisi kesehatan Fillep Karma (Papua Pos).

20 Februari
Barisan Organisasi West Papua National Otority Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar demo damai di Kantor DPRD

Dipindai dengan CamScanner

Yapen. Mereka menuntut perjuangan hak-hak orang Papua kepada pemerintah (Papua Pos).

23 Februari
Puluhan massa dari Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua menggelar aksi demo di halaman Gedung DPR Papua menuntut pemerintah bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM di Tanah Papua (Bintang Papua).

9 Maret
Suku Amugme mengajukan gugatan terhadap Freeport ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan perampasan tanah adat (Papua Pos).

23 Maret
Aksi demo yang dilakukan oleh massa KNPB ke Gedung DPR Papua dibubarkan oleh aparat karena dinilai berbau makar dan tidak sesuai dengan agenda yang disampaikan ke polisi. Maksud dari aksi demo KNPB adalah menolak dialog Jakarta-Papua, meminta PT Freeport ditutup dan meminta penarikan militer dari Papua (Papua Pos).

25 Maret
Dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam aksi demo oleh KNPB disesalkan oleh Ketua KNPB Buchtar Tabuni. Menurut Buchtar dua orang tersebut adalah orang-orang yang dipengaruhi Miras dan diperalat oleh pihak-pihak tertentu untuk mengacaukan jalannya aksi demo tersebut (Bintang Papua).

4 Mei
Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mendesak Pemprov (gubernur dan wagub) menindaklanjuti SK MRP No. 14 /2009 demi tegaknya harga diri orang asli Papua (Cepos).

14 Mei

Dipindai dengan CamScanner

Ratusan massa Solidaritas HAM dan Demokrasi Rakyat Sipil Papua (SHDRP) berunjuk rasa ke gedung DPRD Jayawijaya. Koordinator, Simeon Daby menyampaikan sembilan sikap yaitu, pemerintah RI segera; pertama, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di tanah Papua. Kedua, menarik pasukan organik dan non-organik dari tanah Papua Barat. Ketiga, rakyat Papua menolak pengiriman transmigrasi di Papua. Keempat, rakyat Papua mendesak seluruh DPR membentuk komisi hukum dan HAM dan komisi HAM khusus untuk Papua Barat. Kelima, rakyat Papua menolak pembentukan milisi Merah putih oleh pemerintah RI. Keenam, pemerintah Indonesia, PBB, Amerika Serikat, Belanda dan gereja-gereja se-dunia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Papua. Ketujuh, rakyat Papua Barat menolak tegas pemekaran Provinsi di Pegunungan Tengah Papua dan meminta pemerintah RI mencabut kembali Provinsi Papua Barat. Kedelapan, UNI Eropa dan negara-negara donator Otsus segera menghentikan dana Otsus karena gagal. Kesembilan, kami Papua Barat meminta agar segera menutup Freeport Indonesia (Cepos).

2 Juni

Forum Mahasiswa Peduli Pendidikan mendesak Uncen dan Kementrian Pendidikan Nasional untuk berpihak kepada para lulusan SMA purta-putri asli Papua dalam penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri (SNMPTN) dari 20% menjadi 70% (Cepos).

5 Juni

Kelompok masyarakat Merauke menggelar aksi demo di DPRD Merauke. Mereka menuntut pemilukada ditunda (Cepos).

22 Juni

Dewan Adat Papua wilayah lima menggelar demo ke DPRD Merauke ; menyatakan dukungan mereka atas pengembalian Otsus ke DPRD, pemerintah provinsi dan NKRI. Sebab, Otsus

Dipindai dengan CamScanner

dinilai gagal dan meminta referendum. Hal ini disampaikan oleh Stanislaus Gebze (ketua) dan John Bob (sekretaris) (Cepos).

25 Juni
Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mendesak untuk menghentikan pemilukada, transmigrasi dan imigran yang masuk ke Papua (Cepos).

26 Juni
Pedagang Pasar Inpres meminta kepastian tempat, terkait rencana berpindahnya tempat mereka ke pasar darurat di Biak. Mereka (sebagian besar mama) menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Biak Numfor (Cepos).

18 Agustus
Sebanyak 29 napi Lapas narkotika Sentani dan 253 napi Lapas Merauke mendapatkan remisi bertepatan dengan HUT RI ke 65 (Bintang Papua).

2 September
Para wartawan menilaiPolda Papua belum mampu mengungkap penebar sms teror dan pembunuhan jurnalis Merauke TV, Ardiansyah Matrais di Merauke. Dalam pernyataan sikap yang dibacakan oleh Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura, Viktor Mambor, mendesak Polda Papua agar melakukan penyelidikan secepatnya untuk mengetahui siapa pelaku dan motif penganiayaan wartawan Merauke TV hingga meninggal. Wartawan juga berharap berdialog dengan kapolda Papua atau Wakapolda, akan tetapi tak satupun yang bersedia berjumpa para wartawan. Kecewa atas sikap itu, semua redaksi media cetak maupun elektronik menyatakan boikot terhadap semua pemberitaan tentang Kepolisian Daerah Papua (Suara Perempuan Papua).

Dipindai dengan CamScanner

14 September
Umat beragama di Papua jangan terpengaruh isu di Amerika terkait statemen Terry Jones di Florida. Jones mengajak orang untuk membakan Al Quran sebagi buntut dari pembangunan Islamic Center di Dekat Lokasi Ground Zero WTC New York. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) mengajak agar tidak terpengaruh isu itu, tetapi justru semakin membangun rasa saling menghormati antar agama (Cepos).

16 September
Masyarakat adat Keerom jangan permalukan diri sendiri. Demikian ungkap Ketua Dewan Adat Keerom, Hubertus Kwambre. Penolakan masyarakat adat terhadap calon bupati/wakil bupati yang bukan asli Keerom dinilainya terlambat. Padahal sejak awal dewan adat telah mengajak masyarakat untuk menentukan calon dari orang asli Keerom, namun masing-masing jalan sendiri dengan mengusung calonnya sendiri (Cepos).

6 Oktober
Masalah pelarangan pembangunan Gereja Katolik di Kaureh oleh PT. Sinar Mas ditindaklanjuti oleh beberapa LSM yang tergabung dalam NGO (Non Goverment Organisation). Selain mendengar alasan pemalangan,mereka juga mempertanyakan mengapa perusahaan memaksa umat Katolik beribadah bersama denominasi gereja yang lain (Cepos).

9 Oktober
Pers sebagai pilar keempat dalam demokrasi tidak dapat berjalan baik di Indonesia dan di Papua pada khususnya. Masih banyak masyarakat, baik sipil maupun militer yang tidak dapat menerima kehadiran pers sebagai media informasi bagi masyarakat itu sendiri. Bahkan kerapkali muncul sikap arogan terhadap insan pers jika berkaitan dengan informasi yang dianggap berbahaya. Untuk itu menurut Letkol Kav. A.

Dipindai dengan CamScanner

Napoleon selaku Waaster Kodam XII Cenderawasih, diperlukan komunikasi yang baik serta keterbukaan untuk menerima koreksi dan kritik agar komunikasi dalam konteks keamanan tetap terjaga dengan baik pula (Bintang Papua).

4 November

Massa KNPB yang dipimpin oleh Maco Tabuni berdemo ke DPRP Papua. Mereka mendesak agar DPRP memfasilitas bertemu dengan Presiden Barak Obama (Bintang Papua).

9 November

Aksi demo untuk menyambut kedatangan Barak Obama oleh Solidaritas Nasional Papua Barat di Ekspo terpaksa dibubarkan oleh Polresta Jayapura dan Polsekta Abepura. Aksi demo ini dipimpin oleh Selfius Bobii (Cepos & Bintang Papua).

13 November

- Ketua Dewan Adat Papua, Forkorus Yaboisembut mengakui selama ini dirinya sering dilacak oleh intelejen dari segala kegiatannya terutama ketika ia dan beberapa rekannya ke luar negeri, ke Amerika Serikat (Bintang Papua).
- Dewan Adat Papua dan sejumlah warga memperingati tewasnya Ketua Presidium Papua, Theys Hiyo Eluays di Taman Makam Theys. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua DAP, Forkorus Yoboisembut.

22 November

Gerakan Solidaritas Nasional Rakyat Papua Bersatu menyeruhkan kepada seluruh komponen di Jayapura agar melakukan mogok terkait kedatangan presiden. Aksi mogok yang dimaksudkan adalah seluruh komponen tidak melakukan aktivitas apapun. Seruan ini disampaikan oleh Selifius Bobii (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

24 November
Massa yang tergabung dalam warga peduli korban kekerasan di Biak menggelar aksi demo di DPRD Biak. Mereka meminta DPRD menindaklanjuti permasalahan penganiayaan yang dialami oleh Adam Marandof yang dilakukan oleh anggota TNI AU. Mereka mendesak agar Komandan TNI AU Manuhua Biak, Letkol Joko Triwibowo dicopot dari jabatannya (Bintang Papua).

30 November
Ratusan warga dari suku Ifar Besar Sentani memalang landasan Bandara Udara Sentani. Alasan mereka memalang areal ini karena tidak setuju dengan pengumuman penerimaan CPNS di Dirjen Perhubungan (Cepos).

10 Desember
Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Papua Anti Korupsi mendesak DPR Papua untuk membentuk satu badan khusus yang menanggani korupsi dan bekerja sama dengan penegakan hukum di Papua (Cepos).

11 Desember
Mahasiswa yang dipimpin oleh Benyamin Gurik menggelar demo di depan Uncen. Mereka menuntut agar segera penuntasan berbagai persoalan HAM di Papua. Aksi demo ini juga dalam rangka memperingati hari HAM Sedunia (Bintang Papua).

D. Penyelenggaraan Pemerintah

4 Januari
Para LSM Antikorupsi melihat bahwa di Papua menjadi salah satu daerah yang cukup banyak bercokol pejabat korupsi. Oleh karena itu LSM mendesak KPK untuk lebih berani dan agresif membongkar berbagai tindakan korupsi (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

7 Januari

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua belum dapat mengakomidir keputusan MRP tentang Keputusan kultur. KPU masih menunggu Perdasi/Perdasus sebagai landasan hukum (Bintang Papua).
- Anggota DPRD Kabupaten Sarmi 2009 – 2014 dilantik (Bintang Papua).
- Pemerintah Kota Jayapura menerima dana sebesar 5 miliar untuk proses Pilkada Walikota dan Wakil Walikota (Papua Pos).

8 Januari

Pemerintah Provinsi Papua menyatakan sikapnya terhadap keputusan MRP soal keputusan kultural. Melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua, J.H.K Roembiak mengatakan MRP seharusnya tidak terlibat dalam ranah politik maupun pemerintahan (Bintang Papua).

9 Januari

Pada tahun 2010 DIPA (Daftar Isian Palkasanaan Anggaran) Provinsi Papua sebesar 21,89 triliun. Dana ini terdiri atas dana alokasi umum 11,119 triliun (1,148 triliun tingkat provinsi dan 9,971 triliun untuk 31 kabupaten/kota). Dana alokasi khusus sebesar 1,5 trilliun (75 miliar tingkat provinsi dan 1,453 untuk kabupaten/kota). Papua juga mendapat dana otsus sebesar 3,49 trilliun yang terdiri dari 2% dana alokasi umum nasional dan dana infrastruktur sebsar 0,8 trilun (Bintang Papua & Papua Pos).

11 Januari

Anggota DPRD Sarmi sebanyak 20 orang periode 2009 – 2014 dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura, Nyoman Dedy Triparsada (Cepos).

12 Januari

Dipindai dengan CamScanner

Majelis Rakyat Papua menentang sikap KPUD Provinsi Papua serta Pemrov yang terkesan meremehkan keputusan kultural no 14/MRP/2009 yang mengisyaratkan penetapan orang asli Papua sebagai calon kepala daerah (Bintang Papua).

14 Januari

- Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat respek dengan Keputusan MRP no 14 2009 (Bintang Papua).
- Dalam diskusi publik "Yap Thiam Hien Award 2009 yang diterima Pastor yohanes Jonga serta prediksi penegakan demokrasi dan HAM 2010 di Tanah Papua yang bertempat di Aula STFT Fajar Timur, Direktur Foker LSM Septer Manufandu menilai sikap pemerintah Provinsi Papua selama empat tahun terakhir ini belum mampu menginventarisir persoalan di Papua (Bintang Papua).
- Pasca dihentikannya program transmigrasi ke Papua namun masih ada praktek transmigrasi terselubung yang dilakukan secara terang-terangan. Menurut Septer Manufandu harus ada Perdasus kependudukan yang mengatur pembatasan migrasi penduduk dari luar Papua ke Tanah Papua (Bintang Papua).

16 Januari

Hofni Simbiak (anggota kelompok adat MRP) menilai Pemprov Papua masih 'tidur' dengan keputusan MRP tentang kultural (Bintang Papua).

20 Januari

- Anggota DPR Provinsi Papua sampai saat sekarang belum mendapatkan buku APBD 2010 (Bintang Papua).
- Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Koalisi Lintas Partai Kabupaten Tolikara melakukan aksi unjuk

Dipindai dengan CamScanner

rasa di Kantor KPU Provinsi Papua. Mereka meminta KPU provinsi segera melakukan pemecatan kepada seluruh anggota KPU Kabupaten Tolikara (Bintang Papua & Papua Pos).

- Sebanyak 69 kepala kampung yang berada di Kabupaten Boven Digoel mengadakan studi banding selama 2 minggu di Prubalingga, Jawa Tengah (Papua Pos).
- Walikota Jayapura, M.R Kambu menyerahkan dokumen penggunaan anggaran (DPA) kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura. Jumlah DPA-SKPD yang diserahkan sebanyak 68 yang terdiri dari, 33 untuk pimpinan SKPD , 29 DPA-SKPD untuk UPT sekolah SLTP dan SLTA dan 6 DPA-SKPD untuk pimpinan unit atau kepala bagian. Total anggaran sebesar Rp 612.667.574.000 (Papua Pos).

21 Januari

Para kepala suku dari 8 distrik bersama, puluhan tokoh masyarakat, pemuda dan anggota DPRD Kabupaten Puncak akan menduduki kediaman Gubernur Papua jika tidak segera melantik Bupati Careteker Kabupaten Puncak (Bintang Papua & Papua Pos).

22 Januari

Pemeriksaan Ketua DPR Papua, Jhon Ibo terkait kasus dugaan korupsi 5,2 miliar ditunda (Bintang Papua & Papua Pos).

25 Januari

Dalam rangka menyukseskan Pilkada, KPUD Mambramo Raya membutuhkan dana 23 miliar (Bintang Papua).

27 Januari

Dalam rangka pembangunan infrastruktur pemerintahan di

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Deyai, Pejabat Bupati Deyai Blasius Pakag mengakui 75 miliar APBD masih belum cukup dalam proses pembangunan tersebut (Bintang Papua).

30 Januari
Dari perdebatan publik perubahan nama Kota Jayapura yang digelar oleh Pemerintah Kota Jayapura, akhirnya bersepakat menggantikan nama Kota Jayapura menjadi Port Numbay (Papua Pos & Bintang Papua).

2 Februari
Ketua DPR Papua, Jhon Ibo yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi sebesar 5,2 miliar memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Papua untuk diperiksa (Bintang Papua & Papua Pos).

6 Februari
Penambahan 11 kursi di DPR Papua oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pemrov Papua, DPR Papua dan MRP akan membahas penyusunan Perdasus (Papua Pos).

8 Februari
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Paniai berhasil menetapkan 20 anggota anggota DPRD di dua kabupaten yakni, Kabupaten Intan Jaya dan Deiyai (Bintang Papua).

9 Februari

- Sebanyak 5 orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi dana APBD Kabupaten Boven Digoel tahun 2007 terkait proyek pengadaan Kapal Tongkang dan Alat Bor di Pemkab Boven ditahan di Polda Papua (Papua Pos).
- Koordinator PCW, Rifai Darus menyerahkan laporan indikasi korupsi dari hasil audit BPK RI terhadap pengelolahan proyek Dinas Pehubungan Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Sorong Selatan dan Proyek RSUD Sorong kepada Polda Papua (Papua Pos).

- Bupati Johanes Gluba Gebze mengajak SKPD Merauke agar menyukseskan program MIFEE (Papua Pos).

10 Februari

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyiapkan Perbup dan Perda sebagai pedoman untuk mengatur seluruh pengelolaan keuangan termasuk penertiban pendapatan-pendapatan (Papua Pos).
- Dari pertemuan antara Masyarakat Adat Keerom dengan MRP disepakati bahwa dalam Pilkada nanti Masyarakat Keerom menginginkan orang asli Keerom yang menjadi bupati dan wakil bupati (Papua Pos).

11 Februari

- Pemerintah Kabupaten Supiori menyiapkan dana sebesar 8 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Juni 2010 (Bintang Papua & Papua Pos).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana 84 miliar dari pemerintah pusat untuk persiapan sensus penduduk 2010 (Papua Pos).

12 Februari

- Masyarakat dari 8 distrik di Kabupaten Puncak Jaya meminta agar pejabat bupati yang akan dilantik menjadi Bupati Kabupaten Puncak harus orang asli Papua (Bintang Papua).
- Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura dan anggota dewan lainnya akan segera mendapatkan kendaraan dinas operasional untuk menunjang tugas-tugasnya, 2 unit kendaraan untuk pimpinan, 3 unit untuk komisi dan 3 unit untuk fraksi (Papua Pos).

Dipindai dengan CamScanner

Sorong Selatan dan Proyek RSUD Sorong kepada Polda Papua (Papua Pos).

- Bupati Johanes Gluba Gebze mengajak SKPD Merauke agar menyukseskan program MIFEE (Papua Pos).

10 Februari

- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen telah menyiapkan Perbup dan Perda sebagai pedoman untuk mengatur seluruh pengelolaan keuangan termasuk penertiban pendapatan-pendapatan (Papua Pos).
- Dari pertemuan antara Masyarakat Adat Keerom dengan MRP disepakati bahwa dalam Pilkada nanti Masyarakat Keerom menginginkan orang asli Keerom yang menjadi bupati dan wakil bupati (Papua Pos).

11 Februari

- Pemerintah Kabupaten Supiori menyiapkan dana sebesar 8 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Juni 2010 (Bintang Papua & Papua Pos).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mendapatkan kucuran dana 84 miliar dari pemerintah pusat untuk persiapan sensus penduduk 2010 (Papua Pos).

12 Februari

- Masyarakat dari 8 distrik di Kabupaten Puncak Jaya meminta agar pejabat bupati yang akan dilantik menjadi Bupati Kabupaten Puncak harus orang asli Papua (Bintang Papua).
- Pimpinan DPRD Kabupaten Jayapura dan anggota dewan lainnya akan segera mendapatkan kendaraan dinas operasional untuk menunjang tugas-tugasnya, 2 unit kendaraan untuk pimpinan, 3 unit untuk komisi dan 3 unit untuk fraksi (Papua Pos).

Dipindai dengan CamScanner

13 Februari

- Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terasing dalam tahun 2010 memberikan bantuan kepada 11 organisasi sosial (Bintang Papua).
- Sebanyak 177 pejabat struktural dan fungsional dilantik oleh Bupati Kabupaten Biak Numfor (Bintang Papua & Papua Pos).

15 Februari

- Komisi A DPRD Mimika akan memanggil pihak Kejaksaan Negeri, Polres, Pangkalan TNI AL sehubung kasus penelataran sejumlah warga negara asing asal Thailand dan Kamboja di Pumako (Bintang Papua).
- Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk sementara ini menganggarkan dana untuk Pilkada sebesar 5 miliar (Bintang Papua).
- Pemerintah Pusat telah mempersiapkan PP no 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang antara lain menetapkan kawasan Merauke sebagai kawasan andalan dengan pertanian sebagai sektor unggulan (Papua Pos).

16 Februari

Para mahasiswa Stisipol Yaleka-Maro mendukung DPRD Merauke dalam usaha untuk membongkar hutang Pemkab Merauke yang berjumlah 400-an miliar (Papua Pos).

17 Februari

- Lembaga Musyawarah Adat Suku Amugme mempertanyakan dana APBD 2009 dan 2010 sebesar 1,4 triliun yang dinilai tidak dirasakan oleh masyarakat (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mimika membentuk Pansus dengan tugas mengawal upaya pemberantasan Miras (Bintang Papua).
- Kejaksaan Negri Mimika menolak bertanggung jawab terhadap WNA asal Thailand dan Kamboja (Bintang Papua).

18 Februari

Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan Fidan Har sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan kawasan pengembangan ekonomi terpadu tahun anggaran 2005/2006 sebesar 6,5 miliar (Bintang Papua).

20 Februari

- Walaupun sudah ada Perda no 5 tahun 2007 tentang penertiban peredaran Miras namun implementasi di lapangan tidak sesuai. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Komisi B DPRD Mimika, Anastasia Tekege (Bintang Papua).
- Akhirnya Carateker Bupati Puncak dan Mambramo Raya dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu. Carateker Bupati Puncak dijabat oleh L.A. Bolling dan Mambramo Raya dijabat oleh Alfons Sesa (Papua Pos).

23 Februari

Kantor Bupati Keerom dipalang oleh warga yang tidak setuju dengan pengumuman hasil tes CPNS. Peristiwa yang terjadi di Kabupaten Deiyai (Bintang Papua).

25 Februari

Pajak PT Freeport 17 triliun setiap tahun disetor ke pusat sedangkan untuk Papua hanya 40 miliar (Bintang Papua).

1 Maret

Dipindai dengan CamScanner

- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Ahmad Hatari sebagai saksi kasus proyek fiktif di Sorong Selatan senilai 1,2 miliar (Bintang Papua).
- Bupati Boven Digoel, Yusak Yaluwo dijadikan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Yusak diduga melakukan tindakan korupsi APBD Boven Digoel 2007 dan dana Otsus (Bintang Papua & Papua Pos).
- Keputusan MRP no 14 tentang syarat kepala daerah dan wakilnya belum bisa diterapkan dalam Pilkada karena dinilai masih sangat lemah dan tidak berkekuatan hukum (Bintang Papua & Papua Pos).

2 Maret

- Ahmad Hatari yang sebelumnya menjadi saksi dalam kasus korupsi di Sorong Selatan, kini ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Satuan III Tipikor Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Papua (Bintang Papua & Papua Pos).
- Dewan Adat dan Ikatan Perempuan Sarmi meminta kepada KPU Provinsi untuk segera menggantikan ketua dan anggota KPU Sarmi sebelum Pilkada (Papua Pos).
- Pemerintah Provinsi Papua menyerahkan 160 SK CPNS tahun 2008 kepada CPNS golongan 3 dan 2 formasi 2008 (Papua Pos).

3 Maret

- Ahmad Hatari yang sudah menjadi resemi tersangka kasus korupsi menolak untuk menandatangi berita acara penangkapan. Menanggapi hal ini praktisi hukum, Hotwy Gultom mengatakan tidak semua tersangka ditahan karena ada pertimbangan pekerjaan tersangka (Bintang Papua & Papua Pos).

Dipindai dengan CamScanner

- Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meluncurkan secara resmi website dengan nama www.jayawijayaakab.go.id (Bintang Papua & Papua Pos).
- Ketua Komisi A DPRD Mimika, Elminus Mom menilai Pemkab kurang mengakomodasi atau kurang memperhatikan kepentingan putra daerah dalam penerimaan CPNS 2009 (Bintang Papua & Papua Pos).

4 Maret

- Program MIFEE yang akan diluncurkan oleh Pamkab Merauke dinilai sangat mengkhawatirkan dan patut dicermati secara arif dan bijaksana. Hal ini disampaikan oleh Foker LSM (Bintang Papua).
- Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Biak Numfor selama Januari – Februari 2010 mencapai 800 juta (Bintang Papua).

5 Maret

- Anggaran untuk Pilkada Merauke yang diusulkan oleh KPUD sebesar 27 miliar hanya disetujui oleh Pemkab senilai 13,2 miliar (Papua Pos).
- Sejumlah anggota DPD mendesak agar dilakukan renegosiasi terhadap kontrak karya PT Freeport karena kontrak tahap kedua pada tahun 1990-an dinilai sangat merugikan (Papua Pos).

6 Maret

Kementrian Perumahan Rakyat pada tahun 2010 memprogramkan pembangunan 270 unit rumah layak huni di Kabupaten Biak Numfor (Bintang Papua).

8 Maret

Lembaga Masyarakat Adat wilayah Pegunungan Tengah meminta agar diberikan 6 jatah kursi di DPR Provinsi Papua

Dipindai dengan CamScanner

(Papua Pos).

9 Maret

Dewan Perwakilan Rakyat Papua mendesak Gubernur Papua untuk menggantikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi (Papua Pos).

10 Maret

- Pemerintah dan DPRD Kabupaten Keerom diminta untuk merancang Raperda larangan terhadap Miras (Bintang Papua).
- Komisi Pemberantas Korupsi dan BPK melakukan pemeriksaan terhadap 5 orang pejabat dari Pemkab Boven Digoel. Kelima pejabat tersebut adalah Kepala Bawasda, Ino Tetool dan 4 bendahara (Papua Pos).
- Sebanyak 20 anggota DPRD terpilih Kabupaten Puncak dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire (Papua Pos).
- Komisi C DPR Papua membentuk Pansus untuk mengusut masalah pengalokasian dana 19 miliar pada tahun 2007 pada TV Mandiri Papua (Papua Pos).

13 Maret

- Total dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dan Respek Kabupaten Supiori mencapai 9 miliar (Bintang Papua).
- Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya mengalokasikan dana untuk bantuan pembangunan gereja sebesar 10 miliar (Papua Pos).

15 Maret

- Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE)

Dipindai dengan CamScanner

yang diajukan pemerintah Kabupaten Merauke untuk dibiayai APBN ditanggapi oleh Komisi IV DPR RI dan akan diusulkan ke pemerintah pusat (Papua Pos).

- Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperketat penyaluran dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai organisasi, profesi maupun instansi vertikal (Bintang Papua & Papua Pos).

17 Maret

- Direktur ICS Papua, Budi Setyanto prihatin akan pemberantasan korupsi yang selalu dijanjikan oleh Kapolda Papua yang baru. Hal ini seperti kasus dugaan korupsi oleh Jhon Ibo dan Ahmad Hatari tidak mendapat keseriusan dari pihak Polda Papua (Bintang Papua).
- Tim Komisi Pemberantas Korupsi menuju ke Boven Digoel untuk mengadakan pemeriksaan dan melakukan penyitaan terkait kasus dugaan korupsi oleh Bupati Boven Digoel, Yusak Yalumo (Papua Pos).
- Jumlah belanja tidak langsung Kabupaten Yapen tahun anggaran 2010 sebesar Rp 243.159.507.597, belanja langsung Rp 186.553.692.816 sehingga total Rp 429.713.200.395 (Papua Pos).
- Solidaritas Pencari Kerja Pribumi Mimika mendesak DPRD Mimika membentuk Pansus untuk mengatasi sejumlah permasalahan CPNS (Papua Pos).

19 Maret

Gubernur Papua, Barnabas Suebu menegaskan bahwa sebagai Gubernur Papua ia tidak akan melindungi para pejabat di Pemrov dan kabupaten atau kota yang korupsi (Papua Pos).

22 Maret

- Gubernur Barnabas Suebu menyetujui kepala daerah

Dipindai dengan CamScanner

bupati, walikota dan wakilnya tidak harus asli Papua. Pernyataan Barnabas Suebu ini masih belum bisa diterima oleh banyak pihak (Bintang Papua).

- Sekitar 600 aparat kampung dan Bamuskam diberikan tunjangan penghasilan aparat pemerintah kampung sekabupaten Keerom sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan aparat kampung (Bintang Papua).
- KPU Kota Jayapura membuka pendaftaran bagi calon walikota dan wakil walikota. Pendaftaraan ini selama 4 hari, (22-25 maret 2010) (Papua Pos).

23 Maret

Aksi demo damai yang dikoordinir oleh LMA Nduga dan BP3DN di Kantor Perwakilan Kabupaten Nduga di Wamena meminta BPK mengaudit keuangan Kabupaten Nduga (Papua Pos).

25 Maret

Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang telah mendaftar dan telah diputuskan adalah Abisai Rollo dan Raynalda Kaisepo, Jan Hendrik Hamadi dan Lievelien Loiusa Ansanay, Benhur Tommy Mano dan Nur Alam, Musa Youwe dan Rustam Saru, Yulius Mambay dan Petrus Paulus Ell dan Semuel Mehue dan Hj. Zubaudah Onny (Papua Pos).

27 Maret

Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem mengatakan rekomendasi MRP no 14 tahun 2009 dan UU Otsus tetap memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah untuk membentuk Perdasus tentang pemimpin daerah (Bintang Papua & Papua Pos).

29 Maret

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor merevisi Perda Miras No 17 tahun 2005 tentang retribusi Miras pasca dibatalkan peraturan tersebut oleh Kementrian Dalam Negeri tahun 2008

Dipindai dengan CamScanner

(Papua Pos).

30 Maret
Badan Eksekutif Mahasiswa Papua mendesak Badan Kehormatan KPUD Provinsi Papua untuk segera merekomendasikan Pengganti Antar Waktu terhadap 5 anggota KPUD Jayawijaya (Papua Pos).

5 April
Ketua Komisi D yang membidangi infrastruktur dan pembangunan DPR Papua, Jhoni Banua Rouw mengatakan dalam pembanguan di Papua hal yang harus diprioritaskan adalah infrastruktur jalan. Sebab, ada bebarapa kabupaten yang sulit dijangkau dengan jalur darat (Cepos).

12 April
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga menolak Program Transmigrasi dari Barnabas Suebu (Gubernur Papua), khususnya di wilayah Pegunungan Tengah Papua (Cepos).

14 April
Daftar calon bupati dan wakil bupati Keerom:

No	Nama bakal calon bupati dan wabup. Keerom
1	Drs. Celsius Wetae-Bambang widyatmoko, SH. M.Si
2	Yusuf wallay, SE, MM- Muh. Markum, SH
3	Johanis TawaiWidodo Budi Priyono
4	Charles Tafor- Natan Bonay
5	Pieter Gusbager-Nicholas Laly
6	Billy Yamlean-Nahor Sibiar

(Cepos)

Dipindai dengan CamScanner

26 April

Rapat kerja daerah menghasilkan 13 rumusan, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, Alex Rumasb. Ketiga belas rumusan itu antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik; reformasi birokrasi dan tingkatkan jata kelola keuangan daerah secara konsisten.
2. Peningkatan tata pemerintahan yang baik,
3. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal,
4. Penyelesaikan sengketa batas wilayah antara daerah difasilitasi oleh pemerintah & diperioritaskan pada 2011,
5. Dukungan provinsi, kabupaten&kota terutama dukungan keamanan diperlukan demi suksesnya pelaksanaan pemilukada khususnya di daerah pedalaman yang menggunakan noken, agar memenuhi asas demokrasi terutama jujur dan adil serat bebas&bertanggungjawab.
6. Penanganan kasus penembakan Puncak Jaya akan dibicarakan di MUSPIDA&Pemerintah Puncak Jaya,
7. Terlaksanannya Respek melalui PNPM mandiri Respek,
8. Setiap kabupaten menyusun secara lengkap dokumen perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka tahunan (RKPD) dan didukung oleh penyiapan data yang akurat meliputi RTRW, profil daerah, evaluasi pembangunan dan perencanaan teknis lainnya.
9. Meningkatkan koordinasi & singkronisasi antar provinsi & kabupaten/kota akan dilakukan melaui musrenbang secara berjenjang dari kampung, distrik, kabupaten/kota & provinsi.
10. Untuk memantapkan koordinasi dan singkronisasi program pemerintahan dan pembangunan antara provinsi-kabupaten/kota akan dilaksanankan minimal tiga kali setahun sesuai dengan amanat peraturan pemerintah no. 19/2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi.

Dipindai dengan CamScanner

11. Perencanaan, pembangunan dan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua akan dilaksanankan secara sinergis antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dengan pendekatan penegmbangan wilayah dan sinergi pembangunan antar wilayah.
12. Pembangunan & pendanaan secara sinergis yang dimaksud adalah pemerintah pusat akan membangun infrastruktur yang berfungsi melayani antarprovinsi, infrastruktur antar kabupaten dibangun provinsi & infrastruktur antar distrik dibangun kabupaten/kota,
13. Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya akan dilaksanakan pada wilayah yang minim infrastrukturnya (Cepos).

30 April

Kepala Bidang Pengawasan Pengendalian Respek BPMK dan KK Provinsi Papua, Donatus Mote mengungkapkan setiap distrik mengelola dana mencapai miliaran rupiah, sumber dananya dari APBN dan APBD. Pendamping terhadap dana tersebut sebanyak 550 orang. Sumber dananya Otsus 100 juta /kampung, dana kegiatan operasional kegiatan distrik 100 juta, dana APBN berupa bantuan langsung ke masyarakat 450-1,4 miliar dan dana operasional kegiatan distrik berupa penyuluhan, pelatihan bagi masyarakat 100 juta/distrik dan juga untuk pembangunan berbagai macam kebutuhan kampung (Cepos).

16 April

Dewan Pendamping Rakyat Papua (DePeRa) menuntut bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua, sebagai bentuk pemberdayaan orang asli Papua. Mereka berdemo di kanto DPRD Merauke (Cepos).

5 Mei

Pengurusan Akte kelahiran gratis diberlakukan selama 2010.

Dipindai dengan CamScanner

Sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabuapten Superiori telah diinstruksikan agar mengoptimalkan pelayanan publik secara baik (Cepos).

7 Mei

Forum Mahasiswa Peduli Masyarakat Pegunungan Tengah menggelar aksi demo ke Kantor Gubernur Papua. Para pendemo menolak program transmigrasi ke Provinsi Papua (Cepos).

10 Mei

Tujuh kampung di Mimika Timur belum menerima dan respek 2009. Dana Respek diterima 2008 dari 300 juta hanya 162 juta diterima. Alasannya, tidak ada kerja sama dari pendamping Provinsi Papua dengan pemerintah kampung. Dana Respek 2009-2010 belum dicairkan karena belum ada pertanggungjawaban dari pendamping lama (Cepos).

14 Mei

Di Merauke warga kampung Selil menggunakan dana respek 2008, dari 100 juta, 80 Juta untuk membangun 19 unit rumah dan 20 juta untuk membiayai para pekerja. Sementara respek 2007 digunakan untuk membangun sumber air untuk masyarakat dan respek 2009 belum diterima (Cepos).

15 Mei

- Sekertaris Bappeda Provinsi Papua, Hamzah mengatakan pemerintah mengucurkan dana respek 340 miliar. Tujuan dana tersebut untuk menumbuhkan ekonomi dan mendukung program pembangunan di kampung. Sehingga dana tersebut perlu digunakan sesuai dengan perencanaan dan pengelolaan, pelaksanaan sampai proses pertanggungjawabannya (Cepos)
- Pemprov Papua (Bas Suebu) mengembangkan jaringan

Dipindai dengan CamScanner

penelitian dan pengembangan pendidikan serta kesehatan. Sebab, Papua menjadi urutan 33 atau provinsi terakhir seindonesia. (Cepos).

18 Mei

Program Respek 2009, 86% dari 300 miliar digunakan untuk infrastruktur. Pernyataan ini dikatakan oleh Max Kambuaya (Kepala Bidang Pemberdyaaan Masyarakat Kampung dan Kesejahteraan Keluarga (BPMK dan KK) Provinsi Papua (Cepos).

27 Mei

- Penunjukkan kepala kampung merupakan wewenang bupati, sesuai dengan Peraturan Pemerintah no. 72 tentang desa dan kelurahan pemilihan dan jabatannya diatur dalam Perda (Cepos).
- Persyaratan untuk pemekaran Grimne Nawa diminta oleh DPR RI (Cepos).

29 Mei

Masyarakat di Biak menggelar demo ke Kejaksaan Negri Biak. Masyarakat mempertanyakan penanganan kasus-kasus korupsi di wilayah Biak Numfor dan Supiori, baik yang ditangani kejari Biak maupun Kejari Papua saat ini (Cepos).

1 Juni

Dana respek 2009 belum dicairkan kepada semua kampung di Merauke. Hal ini karena ada perbedaan pendapat atas pencairan respek 2008; masyarakat Kimmaam dan Okaba (Cepos).

8 Juni

Tiga fraksi (Golkar, Demokrasi pembaharuan dan Kerakyatan) menerima laporan keterangan pertanggunganjawaban (LKPJ) Bupati Keerom, Celsius Wetae TA 2009 dan satu fraksi

Dipindai dengan CamScanner

–demokrat abstain. Sebab, belum ada hasil audit BPK laporan keuangan pemerintah Daerah (LKPD) Keerom (Cepos).

12 Juni

Di akhir masa jabatan MRP beredar isu yang mengatakan untuk memilih dua lembaga MRP, yakni di Propinsi Papua dan Papua Barat. Namun, hal ini ditolak oleh kepala biro hukum Sekda Provinsi Papua, J.K.H. Roembiak (Cepos).

17 Juni

Dana 2 miliar rencananya untuk menyediakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kabupaten Yalimo sebanyak 186 unit tidak terealisasi. Warga masih tetap memakai genset (Cepos).

26 Juni

- Dana PNPM mandiri distrik Arso berkurang: 2009-2010, karena dari 21 kampung menjadi 17 kampung. Empat kampung (Wembi, PIR 4, Wamber dan Yambra) bergabung ke Distrik Arso Timur pada 2010 (Cepos).

- Sisa dana pembanguan rumah ex TPN/OPM di Kabupaten Lani Jaya sebanyak 19 miliar dipertanyakan: mantan TPN/OPM dan anggota komisi B DPRD Deerd Tabuni (Cepos).

28 Juni

Pemerintah Provinsi Papua menandatangani kerja sama dengan Freeport Indonesia dalam rangka pembangunan PLTA Urumuka (Cepos).

29 Juni

Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe mengatakan bahwa dana respek 100 juta/ kampung tidak mencukupi. Sebab, tempatnya kompleks (berjauhan satu dengan yang lain dan untuk jangkau

Dipindai dengan CamScanner

gunakan transportasi udara). Sehingga dana respek tidak merata setiap kampung. Wagub Papua, Aleks Hesegem mengatakan bahwa mulai tahun ini akan ada perubahan; daerah yang tingkat kesulitannya tinggi mendapatkan dana lebih besar dibandingkan dengan daerah yang tingkat kesulitannya rendah (Cepos).

2 Juli

- Walikota Jayapura, MR Kambu menyerahkan bantuan program pemberdayaan distrik untuk Distrik Jayapura Utara. Bantuan itu berupa, sarana Ibadah (Alquran dan Alkitab), modal usaha untuk mama-mama penjual pinang, alat musik gitar dan bantuan untuk kelompok usaha kios (Bintang Papua).
- KPU Provinsi Papua melantik 24 anggota KPU untuk lima kabupaten yakni Kabupaten Lanny Jaya, Mambramo Tengah, Nduga, Yalimo dan Dogiai (Bintang Papua).
- Pasangan calon Walikota Jayapura Julius Mambay dan Pieter Ell memprotes politik uang dalam pemilikada walikota di kantor KPU (Cepos).

5 Juli

Sebanyak 33 anggota DPRP asal Pegunungan Papua mendesak pemerintah untuk mengalokasikan dana senilai 60-70 triliun guna mempercepat pembangunan di daerah Pegunungan Papua (Bintang Papua & Cepos).

8 Juli

- Sesuai janji sebelumnya, hari Kamis (8/7) massa MRP akan kembali melakukan longmarh ke DPRP, guna mempertanyakan tindak lanjut terhadap 11 keputusan Mubes MRP dan masyarakat adat papua yang sudah diserahkan pada tiga pekan lalu. Seperti diketahui

Dipindai dengan CamScanner

dalam 11 keputusan yang direkomendasikan MRP tersebut adalah menuntut segera dilakukan referendum untuk Papua. Koordinator Aksi demonstrasi, Salmon Y. Yumame, kepada wartawan di Abepura, Rabu (8/7) kemarin mengatakan aksi yang dilakukan hari ini didasarkan pada MoU antara komponen rakyat Papua dengan DPR yang dibuat saat aksi penyerahan hasil Mubes lalu (Bintang Papua).

- Masyarakat Papua dari berbagai macam elemen perjuangan sipil di papua, baik dari dewan adat, presidium dewan adat Papua, dan organisasi sipil lainnya akan kembali melakukan aksi demo besar-besaran untuk menagih janji ke Dewan Perwakilan Rakyat papua (DPRP)atas tuntutan demo sebelumnya yang di gelar 18 Juni lalu (Cepos).

9 Juli

Ribuan masa dari bergai macam elemen masyarakat sipil papua kemarin melakukan aksi demonstrasi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat(DPRD) untuk menagih janji DPRP atas tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan mereka saat melakukan aksi penolakan Otsus dan tuntutan Referendum pada 18 juni lalu (Cepos & Bintang Papua).

12 Juli

Ribuan masa dari berbagai macam elemen masyarakat sipil Papua yang melakukan aksi demonstrasi di DPRP sejak Kamis (8/7), maka pada jumat (9/7)sore mereka mem dari bubarkan diri. Anggota DPRP yang dipimpin oleh Wakil ketua II Komarudin Watubun yang mewakili Ketua DPRP Jhon Ibo, yang tidak berada di tempat dengan anggota Dewan lainnya dari berbagai komisi yang ada bertemu dengan massa melakukan MoU antara rakyat Papua dan DPRP yang terdiri

Dipindai dengan CamScanner

dari 3 poin, antara lain 1) DPRP meminta maaf karena tidak bisa mengabulkan tuntutan Referendum, 2) DPRP akan mengembalikan Otonomi Khusus ke pemerintah pusat, 3) Sidang paripurna akan dilaksanakan paling lambat 19 Juli 2010 (Cepos & Bintang Papua).

14 Juli

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilukada 2010 antara lain, Abisasi Rollo & Reynalda Kaisepo, Benhur Tommy Manu & Nur Alam, Musa Youwe & Rustan Saru dan Jan Hamadi & Lievelien Ansanay (Cepos).

16 Juli

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom yang mengikuti Pemilukada Keerom adalah Billy Jamlean & Nahor Sibiar, Yusuf Wali & Muh. Mahkum, Celcius Wetae & Marsudi, Charles Tafor & Nathan Bonay, Piter Gusbager & Nikolaus Laly dan Johanis Tawa & Widodo Budi Priyono (Cepos).

17 Juli

Dewan Pimpinan Pusat Barisan Merah Putih menyurati Gubernur Papua untuk mempertanyakan surat Mendagri no 188.2/1869/SJ perihal tindak lanjut putusan MK no 116/PUU-VII/2009 tentang pengisian anggota DPRP, Ketua DPRP dan Ketua MRP. Hal ini disampaikan oleh Ketua BMP Ramses Ohee (Bintang Papua).

20 Juli

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Merauke mengajukan tambahan anggaran sebesar 7,6 miliar dari 13,5 miliar yang telah disetujui oleh Pemda dan DPRD Merauke (Cepos).

21 Juli

Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Papua tidak mampu dan

Dipindai dengan CamScanner

sulit melacak uang senilai 156 miliar. Hal ini dikatakan oleh Kepala Perwakilan BPK Papua, Haedar ketika menyerahkan hasil laporan audit BPK Papua di sidang LKPJ Gubernur. Beliau melanjutkan bahwa tidak mendapatkan dukungan dari dokumen yang memadai sehingga dana 156 miliar tersebut sulit ditelusuri (Bintang Papua).

22 Juli

Massa yang berasal dari Puncak Jaya menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur. Mereka mempertanyakan jawaban surat mengenai carateker Bupati Puncak Jaya (Cepos).

24 Juli

Pemanfaatan anggaran di Pemrvo Papua terus menjadi sorotan. Sebelumnya hasil penemuan BPK terkait hilangnya uang sebesar 156 miliar, kini permasalahan muncul kembali terkait sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa) pada laporan keuangan Pemrov Papua tahun 2009 senilai Rp 996.118.169, 69. Sisa anggaran ini dipertanyakan oleh DPRP karena tidak jelas pertanggungjawabannya (Bintang Papua).

27 Juli

- Kasus dugaan korupsi APBD tahun 2006 sebesar 5,2 miliar yang melibatkan Ketua DPRP Jhon Ibo sudah pada tahap rencana dakwaan (Bintang Papua & Cepos).

- Maraknya kasus penembakan dan konflik yang terjadi di Tingginambut, Puncak Jaya menyebabkan dana APBD Puncak Jaya banyak dikeluarkan untuk mengevakuasi korban penembakan dan membiayai operasi aparat keamanan yang bertugas di Puncak Jaya (Cepos).

29 Juli

Adanya indikasi berbagai kasus korupsi yang dilakukan para pejabat Papua yang belum mendapat sentuhan hukum sesuai

Dipindai dengan CamScanner

dengan tingkat kejahatannya, membuat puluhan massa dari Komite Nasional Papua Barat(KNPB) melakukan aksi damaidi Kantor Kejati Papua, Rabu 28/7, kemarin. Massa KNPB menilai bahwa koruptor itulah yang disebut sebagai separitis, karena mereka yang telah memakan uang rakyat. Oleh sebab itu, para koruptor itu harus segara ditangkap dan diadili. "Kami berharap para koruptor di Papua harus ditindak tegas sesuai aturan hukum, agar Papua ini bersih," Teriak Gepamer Alua, selaku koordinator demo. (Cepos)

2 Agustus

- Meninggalnya Ardiansyah wartawan Merauke TV menjadi ancaman bagi para wartawan dan pekerja sosial lainnya. Oleh karena itu DPD Laskar Anti Korupsi Papua mendesak pemerintah segera mengeluarkan undang-undang perlindungan bagi aktivis dan pers (Bintang Papua).
- Enam pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori yang lulus verifikasi KPU adalah, Hulda Inda Imbir & Tnoy Silas Manufandu, Julianus Mnusfer & Theodorus Kawer, Hendrik Rumkabu & Marinus Maryar, Josep Amsamsyum & Samuel Sauyas dan Yan Piet Pariaribo & Herman Swom (Bintang Papua).

11 Agustus

- Pemerintah Provinsi Papua khususnya Dinas Perhubungan telah menganggarkan sejumlah dana untuk pembelian 2 unit pesawat terbang secara bertahap yang dimulai dari tahap 2011 sampai APBD 2015 (Bintang Papua).
- Massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke Daniel Walinaulik dan Omah Laduani

Dipindai dengan CamScanner

Ladamay menggelar unjuk rasa di Kantor KPUD Merauke. Massa menilai KPUD Merauke melakukan manipulasi terhadap sejumlah mekanisme pelaksanaan pencoblosan (Bintang Papua).

14 Agustus

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui bahwa Pemilukada gubernur dan wakil gubernur dikembalikan kepada DPRP sesuai UU Otsus pasal 7 (Bintang Papua).

19 Agustus

- Komisi Pemilihan Umum Daerah Keerom menggelar debat publik untuk enam calon bupati dan wakil bupati Keerom periode 2010 – 2015 di ruang sidang DPRD Keerom (Bintang Papua).
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Merauke menggelar pleno pemungutan suara dalam Pemilukada Merauke. Dari hasil pleno tersebut, pasangan Romanus Mbaraka dan Sunarjo mengungguli pasangan yang lainnya (Bintang Papua).

30 Agustus

Ketua DPRP Jhon Ibo menegaskan bahwa setelah diusulkan 5 Raperda (3 Raperdasi dan 2 Raperadasus) khususnya Raperdasus 11 kursi DPRP dan pemilihan anggota MRP merupakan agenda utama yang akan dibahas oleh DPRP (Bintang Papua).

1 September

- Dana pemilukada 3,3 M kurang jelas. Demikian temuan hasil verifikasi dana KPU Kota Jayapura. Dana hibah yang diterima KPU Kota Jayapura Rp 4.924.149.500,00 sementara anggaran yang telah digunakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban formal sebesar Rp

Dipindai dengan CamScanner

1.571.415.000,00 sedangkan sisanya tidak jelas. "Jadi yang didukung oleh pertanggungjawaban formal hanya rp 1,5 M lebih, sisannya penggunaan tidak jelas artinya pengeluaran dana itu tidak sesuai dengan program pokok. Jadi sebanyak 3,2 M lebih penggunaan dana itu tidak sesuai dengan pos anggaran" ungkap mantan Walikota Jayapura, Mr.Kambu (Cepos).

- Sebanayk 178 Perda Kota Jayapura dinilai tidak efektif. "Memang sudah banyak perda kita yang sudah tidak efektif dan bahkan tidak berlaku lagi. Dari 290 perda yang dibaut sejak 1994, 178 dinilai tidak efektif lagi atau sudah tidak berlaku lagi," kata Makzi Lazarus Atanay, SH (Cepos).

2 September

- Persoalan 11 kursi tambahan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mendapat tanggapan. John Ibo selaku Ketua DPRP menilai keputusan itu di luar perundang-undangan yang berlaku baik itu dalam UU No.21 tahun 2001, UU No.32 tahun 2004 serta PP No.16 (Cepos).
- Pemberantasan korupsi di Papua "dingin". Demikian pernyataan Kejati Papua, Constantein Ansanay. Hal ini terlihat dari adanya kesan kasus korupsi yang melibatkan ketua DPRP John Ibo seolah jalan di tempat. Kondisi ini memancing kemarahan rakyat Papua yang berujung pada tudingan makar dan sebagainya bermula dari hilangnya uang rakyat di tengah jalan akibat praktek-praktek korupsi. Akan tetapi tampaknya pemberantasan korupsi di Papua ini biasa-biasa saja (Bintang Papua).
- Disinyalir ada oknum KPPS Keerom dibayar untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Isu money

Dipindai dengan CamScanner

politic ini diungkapkan ketua Panwas Keerom Agus Wenehen karena ada laporan yang masuk dari Kampung Molof dan Worwana(Bintang Papua).

3 September

Pengangkatan 11 kursi DPRP masih butuh PP. Hal ini karena dalam UU No.21 tahun 2001 tentang Otsus maupun UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.35 tahun 2008 tentang perubahan UU No.21 tahun 2001 bahkan peraturan pemerintahan sama sekali bukan merupakan landasan hukum bagi DPRP menyusun peraturan daerah khusus. Hendrik Tomasoa menilai "Hukum mempunyai tiga fokus tujuan; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Soal keadilan, putusan MK No.116 tahun 2009 adalah final" (Cepos).

4 September

- Sebanyak 23 Anggota KPU Kabupaten di Papua telah dipecah. Alasan yang muncul ialah adanya pelanggaran terhadap kode etik sebagai anggota KPU. Ketua KPU Papua , Benny Sweny, mendapatkan laporan bahwa 'mereka terlibat sebagai anggota parpol' (Cepos).
- Pemerintah Provinsi lambat dalam penetapan perda miras. Sipora Modouw, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Papua, menyayangkan hal ini karena miras merupakan salah satu pemicu semakin meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. "saya orang pemerintah, tapi harus kita akui kalau kita lambat dalam membuat perda ini" (Cepos).
- Penerapan perda miras harus dibahas secara kolektif karena bersifat kontoversial. Di satu sisi, dari segi ekonomi merupakan pendapatan daerah yang begitu besar. Di sisi lain, dari segi moral dapat merusak moral marsyarakat dan menjadi faktor utama tindakan kriminal "selama ini perda miras yang sudah berjalan memberi 2

Dipindai dengan CamScanner

wewenang kepada Pemda Merauke yakni untuk menjual dan membeli alkohol dan bagi pemasukan daerah," kata Simon Silubun, Kabag Hukum Setda Merauke (Bintang Papua).

6 September

- Papua Corruption Watch (PCW) menemukan ketidakjelasan penggunaan dana 3,5 miliar yang digunakan oleh KPU Kota Jayapura. Oleh karena itu BPK harus mengaudit kekayaan anggota KPU Kota. Pembeberan hasil investigasi PCW ini dipimpin oleh Daud Basri terkait penggunaan dana Pemilukada Kota Jayapura yang belum jelas pertanggungjwabannya sebesar 3,5 miliar (Cepos).
- Kepala kampung berharap ADK (Alokasi Dana Kampung) segera diperdakan. Kesepakatan ini disampaikan oleh sejumlah kepala kampung kepada Bupati Habel Suwae. Alasannya ADK telah memberikan kontribusi yang nyata bagi percepatan pembangunan di masyarakat terutama dalam mengangkat perekonomian masyarakat (Cepos).
- Panitia Pengawa Pemilu Keerom menerima tiga laporan pelanggaran terkait pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Keerom. Ketua Panwaslu Keerom Agus Wenehen mengatakan ketiga laporan tersebut termasuk kategori laporan berat yakni dugaan kasus bagi-bagi uang ataupun barang serta dugaan tim sukses yang terlibat sebagai petugas di TPS yang memfasilitasi tercoblosnya salah satu pasangan calon (Cepos).
- Charles Tafor dan Piter Gusbager menilai pemilukada Keerom cacat hukum dan gagal. Sementara itu, jalan masuk PIR dua dipalang. Warga yang menamakan diri masyarakat adat menuntut kecurangan dalam

Dipindai dengan CamScanner

pemilukada berupa pembagian uang sebesar 50-100 ribu. Selain itu juga menuntut agar Bupati Keerom merupakan orang asli Keerom. Secara terpisah, Bawaslu RI meminta agar pelanggaran sekecil apapun harus dituntaskan(Bintang Papua).

7 September

- Warga dukung percepatan Perda Miras pada tahun 2010. Warga menilai hal ini perlu dilakukan karena miras telah merusak moral dan mental orang Papua. lebih jauh juga dapat mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. "Di satu sisi miras mendatangkan pajak, tetapi di sisi lain mendatangkan bencana. Jadi harus ada pengaturan yang jelas terkait peredaran miras," kata Ny.Irene Karma, salah seorang warga Padang Bulan distrik Abepura (Bintang Papua).
- Disayangkan sidang perubahan APBD Kabupaten Jayapura terhambat. Keterhambatan ini terjadi karena pihak eksekutif masih mempersiapkan materinya. Padahal sudah molor satu bulan dan batas akhirnya bulan November. Menurut Korneles Yanwarin, Keuta 1 DPRD Kabupaten Jayapura, dalam Permendagri nomor 13 tahun 2006 seharusnya saat ini pembahasan APBD sudah dalam pembahasan oleh legislatif (Bintang Papua).
- Masyarakat Skamto, Keerom melaporkan pelanggaran ke Panwas. Beras, alat shalat dan sejumlah uang dijadikan barang bukti. Ketua Panwas Keerom, Agus Wenehen mengatakan bahwa "kami akan serius menangani masalah ini. apabila terbukti akan menuju ke pidana." Hingga saat ini pihaknya telah mencatat tiga pelanggaran yang secara resmi diterima dari masyarakat (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

- Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merauke terpilih hasil pilkada 2010 dipastikan mundur terkait adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan itu dilayangkan oleh 3 pasangan kandidat yakni Frederikus Gebze-Waryoto, Laurensius Gebze-Achnan Rosyadi, dan Daniel Walinualik-Omah Laduani Ladamay. Isi gugatannya ialah soal Daftar Pemilih Tetap, undangan yang tidak sampai ke pemilih, money politc serta adanya intimidasi. Sementara itu Panwas Supiori menemukan sejumlah pejabat ikut kampanye. Jika di daerah lain hanya PNS, di Supiori sejumlah pejabat eselon II, III dan IV juga ditemukan ikut kampanye. Data-data tersebut telah disampaikan ke KPU Supiori oleh Ketua Panwasluda Kapubaten Supiori, Demi Wompere. Di Jayapura, sejumlah oknum PNS Pemkot ditengarai terlibat tim sukses. Plt Walikota jayapura, Ir.JP Nerokouw menyayangkan hal ini. "Sejak awal bahkan sudah sangat sering kami ingatkan PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi masih saja ada pegawai yang mau terjun ke kancah politik" (Cepos).
- Komisi Nasional Perempuan menyerahkan draft Raperdasus ke DPR Papua. Ketua gugus Kerja Papua Komnas Perempuan, Silvya Maria Apituley menuturkan bahwa isi raperdasus yang diserahkan disusun oleh Komnas bersama dengan MRP, Uncen, Unipa dan Jaringan Pendokumentasian kekerasan di Papua. isinya dibangun atas dasar filosofis, sosiologis dan dasa-dasar hukum yang melindungi dan bersifat melihat pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban pelanggaran HAM (Cepos).
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Koordinasi Pemprov dan DPRD Papua Barat untuk penyusunan draft

Dipindai dengan CamScanner

raperdasus pemilihan anggota MRP. Wakil Ketua Badan Legislasi DPRp, Alberth Bolang mengharapkan adanya kerjasama DPRP dan Pemprov Papua Barat terhadap penyusunan raperdasus tentang pemilihan anggota MRP tersebut. "...dan kita akan membackup juga hasil konsultasi di Depdagri Jakarta terkait dengan produk perdasus ini," ujarnya. Sementara wacana akan adanya dua MRP akan sangat tergantung dari dinamika hukum dan politik. Tentu pula tergantung pada perlindungan terhadap Papua dan Orang Papua (Cepos).

8 September

Komisi A DPRP terus mendorong dilakukannya judicial review terhadap undang-undang Otonomi Khusus terutama menyangkut pasal 7 huruf (a) tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur dikembalikan ke DPRP. "Undang-undang ini membuat kita kaku dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, sehingga ingin kami ingin mengembalikan pemilihan gubernur melalui DPRP sehingga fungsi DPRP menjadi lebih optimal lagi, " imbuh Ruben Magai, ketua komisi A DPRP (Cepos).

13 September

- Program Respek akan didukung perdasus. Perdasus itu mengatur soal alokasi dana dari pemerintah Provinsi dan kabupaten dan kota ke kampung-kampung dan tidak boleh berhenti meskipun pimpinan daerah berganti. Hal ini ditegaskan oleh Staf Ahli Gubernur, Agus Sumule, agar dana itu selain diolah sendiri oleh masyarakat dengan cara yang benar juga untuk menjawab persoalan yang dihadapi di tengah masyarakat kampung.

- Draft Rapedasi pembentukan perdasi dan perdasus

Dipindai dengan CamScanner

digodok oleh Badan Legislasi DPRP. Penggodokan ini telah mencapai 90 persen. Raperdasi ini penting karena dapat membantu penggodokan perdasi dan perdasus yang masuk ke badan legislasi DPRP terutama yang datang dari masyarakat karena masyrakat mempunyai hak mengajukan raperdasus.

Yusak Merasi Pemenang Pemilukada Boven Digoel berdasarkan hasil pleno perhitungan suara tingkat Kabupaten Boven Digoel. Menurut Ketua KPU Boven, hasil ini sah dan mengikat meskipun meski tiga saksi wlk-out dan akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Berikut hasil perhitungan suaranya.

No	Pasangan	Suara	Persentase
1	Yusak-Yesaya	12.709	43,72%
2	Xaverius - Eksan	9.282	31,93%
3	Simon - Paulinus	5.236	18,01%
4	Marselino - Eduard	1.841	6,33%
	Total	29.068	100%

- Dinilai terjadi pelanggaran berat, Bawaslu Pusat akan turun ke Waropen. Hal ini berbuntut dari dicopotnya 5 anggota KPU Waropen. Pelanggaran ini berkaitan dengan UU No 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaran Pemilu.

- Hari ini, 11.141 masyarakat Supiori ikuti pencoblosan calon bupati dan wakil bupati periode 2010-2011.

- Komisi Pemilihan Umum Daerah Keerom tegaskan belum ada pemenang karena belum diadakan rapat pleno. Meskipun ada yang telah melakukan perhitungan

Dipindai dengan CamScanner

sendiri, KPU mengaharapkan suara masyarakat Keerom mengikuti perhitungan yang resmi dari KPU Keerom.

- Rancangan Peraturan Daerah Rretribusi dan Pajak Daerah yang baru mulai disiapkan seiring dengan keluarnya UU No.34 tahun 2009 tentang retribusi dan pajak daerah menggantikan yang lama yakni UU No.18 tahun 1997. Dengan UU ini diharapkan dapat meningkatkan perolehan pajak dan retribusi 6-8 persen dari perolehan sebelumnya yang dinilai masih sangat kecil. Sementara itu dua raperda yakni tentang pemberdayaan kampung dan administrasi kependudukan siap diuji publik (Cepos).

14 September

- Isu pemekaran Kabupaten Deponway semakin mengentarl. Isu ini mengemuka dalam kunjungan kerja Golkar ke Wilayah Pembangunan II Distrik Moy.
- Belum ada alokasi Dana, DPRD Kabupaten Memberamo Tengah minta pemilukada ditunda hingga September atau Oktober 2011. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua 1 DPRD, Agustinus Gundigi.
- Pemilihan Umum Kepala Daerah Supiori berlangsung tepat waktu. Begitu pula pendistribusian logistik sehari sebelumnya (Bintang Papua, 14/09/2010).
- Rancangan Peraturan Daerah Khusus Pemilihan MRP direspon Papua Barat. Selain itu, kata Yan Ayomi, Anggota Badan Legislatif DPDP, mereka juga akan mendukung judicial review yang dilakukan DPRP ke Mahkamah Konstitusi terhadap UU Otsul terutama pasal 7a tentang pemilihan gubernur Papua lewat DPRP yang hilang dalam perubahan UU Otsus No 35 tahun 2008.

Dipindai dengan CamScanner

- Program Respek didukung oleh APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu dana respek mempunyai dua sumber yakni dari Provinsi Papua sebebsar 100 juta/kampung serta dari kabupaten/kota. Dana dari Kabupaten/kota ini sering disebut Alokasi Dana Kampung (ADK). Dalam pelaksanaanya pendamping respek perlu berkoordinasi dengan kepala distrik dan kampung setempat akan menjawab kebutuhan masyarakat itu sendiri. Respek bantu pembangunan di kampung terutama pembangunan sarana infrastruktur. Hal ini dialami oleh Kampung Hobong yang kini telah memiliki MCK, dermaga Hobong hingga sarana olahraga.
- Penyaluran Raskin tahun 2010 di Provinsi Papua dan Papua Barat sampai dengan September 2010 sudah mencapai 59 persen dari total kuota raskin sebanyak 108 ribu ton.
- Pemerintah Kota segera terapkan PP 35 tahun 2010 tanggal 6 Juni tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dengan ini para PNS yang kurang disiplin dalam bekerja dapat meningkatkan kedisiplinannya.
- Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya tetapkan standar harga yang berlaku di seluruh distrik, yakni Rp 41.000. Selanjutnya akan dibuat perda untuk itu. Yustus Wonda, Sekda Kabupaten Puncak Jaya berharap dengan itu pembangunan dapat disesuaikan dengan program, baik dari pemerintah, gereja maupun adat .
- Komisi B Lanny Jaya desak pemkab prioritaskan tiga pembangunan yakni pada bidang jaringan komunikasi, penerangan dan air bersih. Menurut, Terius Jigibalom, ketiga hal ini akan sangat mendukung pemangunan di Lanny Jaya karena tanpa jaringan komunikasi banyak

Dipindai dengan CamScanner

yang tidak betah di Tiom. Begitu pula listrik yang amat penting dalam aktifitas pemerintahan.

- Pembentukan Kota Madya Dafonsoro diwacanakan dalam dialog antara Dewan AdaT Sentani (DAS) dan masyarakat Adar Sentani dengan anggota Fraksi Peduli Rakyat DPRD Kabupaten Jayapura. Menurut Gery Olua, tokoh adat sentani hal ini perlu untuk memberikan proteksi lebih terhadap masyarakat asli Sentani yang akhir-akhir ini mulai terpinggirkan. Sementara itu, ketua DAS yang baru, Demas Tokor mengaku siap melindungi hak ulayat masyarakat, hak hidup dan menyampaikan pendapat agar harkat dan martabat orang asli papua, khususnya Sentani tapat diperhatikan (Cepos).

15 September

- Pemungutan suara di Kabupaten Supiori berjalan lancar. Ini tidak terlepas dari kerjasama semua komponen masyarakat. Untuk sementara pasangan Fred Manufandu-Yan Imbab sementara memimpin22,25%. Namun jika tidak mencapai 30% maka akan lanjut ke putaran kedua. Di samping itu Bupati Julius Mnusefer juga meminta PNS agar memperhatikan kedisiplinan dalam bekerja. Himbauan ini diberitahukan untuk kesekian kalinya akan tetapi masih saja ada pegawai yang tidak menghiraukannya. Bahkan ada kesan mereka hanya masuk pada jam-jam tertentu saja.
- Badan Eksekutif Mahasiswa Uncen menilai KPU Provinsi tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Akibatnya KPU kabupaten dan kota pun tidak bisa berjalan baik dalam melaksanakan pemilukada. Hal ini nampak dengan adanya beberapa pengantian anggota KPU, tidak adanya verifikasi ulang meski ada gugatan hingga kandidat yang terjerat dugaan korupsi .

Dipindai dengan CamScanner

- Aparat pemerintah diminta tidak selewengkan raskin. Plt.Walikota Jayapura, Ir. JP Nerokuow bahkan meminta tidak adanya penyelewengan baik langsung maupun tidak langsung yang diperuntukkan bagi penduduk miskin.
- Wahidan Suaib, anggota Bawaslu RI meminta agar pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Keerom ditindaklanjuti hingga tuntas.
- Meskipun Pemilukada Kota Jayapura direncanakan 11 Oktober mendatang, namun belum ada tim sukses dari para calon walikota dan wakil walikota yang mendaftarkan diri. Padahal dalam kerja lapangan sudah berjalan. Selain itu pula pendaftaran posko kampanye dan rekening dana kampanye agar tidak terdapat dana ilegal yang digunakan sebagai dana kampanye (Bintang Papua, 15/09/2010).

16 September

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sedang mempersiapkan tahapan Pemilukada gubernur pada Desember 2010. Persiapan ini tetap dilakukan sambil menunggu penyelesaian konflik apakah gubernur akan dipilih oleh rakyat atau DPRP. Sementara itu, KPU Keerom gelar pleno untuk menetapkan siapa calon bupati/wakil bupati terpilih dalam pemilukada Keerom. Semua pihak siap kalah dan siap menang.
- Massa pasangan Worumi-Kogoya duduki KPU Kota Jayapura. Mereka menilai SK No 80 tahun 2010 cacat hukum. Selain itu mereka juga menilai tidak ada penjelasan atas tidak lolosnya pasangan ini dalam verifikasi. Selain itu juga, pasangan Yulius Mambay-Pieter Ell dengan tegas pula menolak keputusan KPU No 80 serta mengugat KPU Provinsi. Mereka menilai,

Dipindai dengan CamScanner

KPU Provinsi dalam pentahapan pemilukada telah menyalahi kode etik (aturan KPU), selain itu juga pengguanaan dana 3,2 M yang belum dipertanggungjawabkan.

- Enam pasang calon walikota Jayapura periode 2010-2015 memaparkan visi misinya hari ini. mereka adalah Abisay Rollo-Reynalda Kaisepo, Benhur Tomy Mano-Nuralam, Musa Jan Youwe-Rustan Saru, Jan Hendrik Hamadi-Lievielin Ansanay Monim, Thobias Salossa-Haryanto, Fredrik Toam-Jummy Ansanay (Bintang Papua).

17 September

- Yussuf Wally-Muhamad Markur ditetapkan sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Keerom. Pasangan terpilih ini ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Keerom No 37 tahun 2010 tentang penetapan rekapitulasi pasangan terpilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Keerom. Adapun hasil keseluruhan adalah sebagai berikut:

Nama Kandidat	Perolehan Suara	Persentase
Billy Jamlean - Nahor Sibiar	225	0,76
Yusuf Wally - M.Markum	10.032	33,82
Celcius Watae - Marsudi	9.164	30,96
Charles Tafor - Nathan Bonay	3.076	10,39
Piter Gusbager - Niko Laly	1.186	4,01
John Tawa - Budi Priyono	5.940	20,06
Jumlah Suara Sah		**29.604**
Jumlah suara tidak sah		**501**

Pembacaan hasil pleno diwarnai oleh aksi penolakan tanda tangan dan walk out dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Keerom, Berti M. Menurutnya, pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran dalam pemilukada.

Dipindai dengan CamScanner

Pelanggaran itu antara lain; keterlibatan aparat dalam proses pilkada, money politic di Distrik Arso kampung Workwana, Distrik Web dan Towe Hitam, pendropan beras bagi masyarakat di Saneke, Kriku dan kampung Ujung karang, TPS siluman di kampung Suskun Distrik Arso serta mobilisasi masa dari Jayapura, Sentani untuk memilih kandidat tertentu.

20 September

- Kemendagri memberikan respon positif terhadap rencana Badan Legislastif DPRP yang akan menyusun perdasi tentang tata cara pembentukan perdasi dan perdasus di Papua. Kemendagri menilai hal itu sesuai dengan dinamika hukum yang berlaku di Papua dengan sistem pemerintahan Otsus di Papua.
- Selain membahas Raperdasus Pemilihan anggota MRP yang berakhir masa kerjanya Oktober 2010, Baleg DPRP juga tengah berkonsentrasi membahas raperdasasus pengangkatan 11 kursi anggota DPRP setelah mengambil keputusan yang dikeluarkan oleh MK (Cepos).

21 September

Bupati Jayapura, Habel Suwae, dalam kunjungan mendadaknya ke beberapa distrik menemukan ketidakdisiplinan pegawai. Puskemas Dosay dan Kantor Distrik Waibu kosong melompong. Distrik Depapre dari 32 pegawai hanya 18 pegawai yang masuk kantor. Distrik Sentani Barat hanya 12 yang masuk dan pulang lebih awal sementara 20 lainnya tidak masuk tanpa keterangan.

22 September

- Sebagian besar pasangan calon walikota dan walikota

Dipindai dengan CamScanner

Kota Jayapura belum mengantongi izin kampanye dari kepolisian. Padahal semua kandidat telah mulai berkampanye. Ketua Panwas Kota Jayapura mengancam akan memberhentikan kampanye jika hingga Rabu (22/09) belum ada surat izin kampanye (Cepos).

- Pemilukada Kabupaten Suplori akhirnya ditetapkan menjadi dua putaran karena tidak ada kandidat yang perolehan suaranya mencapi 30 persen. Selain itu, Pemilukada Kabupaten Merauke akan melakukan pencoblosan ulang oleh Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan sengketa pemilukada Merauke (Bintang Papua).

24 September

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura dinilai tidak konsisten soal studi banding. Bahwa ke depan tidak akan ada lagi studi banding yang menghambur-hamburkan uang saja, malah anggota dewan kembali melakukan studi banding ke Kota Palopo, Palu dan Kutai Kerta (Bintang Papua).
- Hasil Pemilukada Manokwari digugat ke MK dan telah sedang dalam proses persidangan (Bintang Papua).
- Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah menyiapkan desain pasar Papua. pasar ini rencananya dibangun 6 lantai dan bisa menampung 1.100 mama-mama pedagang asli Papua dan kerajinan seni Papua. Dana yang dialokasikan sebesar Rp 5 Miliar dari anggaran tahun 2010. Koordinator SOLPAP, Br. Rudolf Kambayong, OFM berharap kejelasan pemerintah dalam membangun pasar tersebut bagi mama-mama Papua (Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

25 September

Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) membentangkan baliho saat sidang DPR. Solpap hendak mengingatkan eksekutif dan legislatif soal janji gubernur untuk membangun pasar bagi mama-mama Papua. Kejadian ini berlangsung saat rapat paripurna DPRP. Koordinator Solpap, Br.Rudolf Kambayong, OFM berharap dengan cara ini akan ada satu langkah maju untuk pembangunan pasar bukan hanya dalam kata-kata tetapi dalam hal yang konkret; pelepasan tanah adat, kesepakatan anggaran, dan peletakkan batu pertama oleh gubernur dan DPRP (Cepos).

27 September

- Pasar sementara bagi mama Papua dipersiapkan. Barnabas Suebu telah memerintahkan dinas PU untuk membangun pasar di Kompleks Damri Jayapura direncanakan Desember ini harus sudah selesai (Cepos).
- Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura menyiapkan Draf Raperda Pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengatur aktifitas pengelolaan tambang sekaligus memberikan perlindungan terhadap kelestarian alaam. Selain itu juga berkaitan dengan kewajiban-kewajiban perusahaan termasuk keterlibatan para pemilik hak ulayat dalam pengelolaan itu sendiri (Cepos).

28 September

- Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengakui bahwa terdapat penyalahgunaan dana respek tidak lebih dari 3 persen (Bintang Papua).
- Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengegaskan bahwa pasar khusus Mama Papua dibangun pada Oktober. Jika tidak sebelum Desember sudah selesai.

Dipindai dengan CamScanner

Selain itu juga akan dibangun koperasi khusus bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan Bank Papua untuk menyiapkan bantuan kredit kecil serta pengadaan beberapa unit kendaraan bagi mereka karena selama ini praktis uang mereka habis untuk membayar transportasi. Dan untuk sementara pasar dibangun di halaman gedung BIKDA (Bintang Papua).

29 September
Pemerintah membentuk badan khusus untuk menangani pembangunan di Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Cepos).

30 September
Perlu adanya affirmative action bagi pembangunan di Papua. demikian hasil pertemuan antara para menteri dengan muspida Provinsi Papua yang dipimpin oleh Gubernur Barnabas Suebu. Tindakan ini dalam rangka mempercepat pembangunan agar masyarakat mempunyai kesempatan yang penuh untuk berkembang secara khusus dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan serta sarana prasana infrastruktur. Namun muncul pula kekecewaan dari DPRP karena tidak diberitahu dan dilibatkan dalam kunjungan ini yang tujuannya untuk mengevaluasi UU Otsus (Cepos).

2 Oktober
Ketua Komisi A DPRD Yalimo, Nahor Yale, Mempertanyakan tempat kerja pegawai Pemerintah Kabupaten Yalimo. Pasalnya beberapa bulan terakhir aktifitas pelayanan di Elelim Ibu kota Yalimo tidak ada. Para pegawai umumnya baru ada di Elelim jika ada acara saja. Malahan beberapa kantor tutup (Cepos).

4 Oktober

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merauke akan membahas 15 raperda dengan perhatian utama ialah

Dipindai dengan CamScanner

raperda tentang Tanah Adat dan Hak Ulayat. Menurut Ketua DPRD, Leo Mahuze, hal ini penting agar masyarakat adat mempunyai kepastian hukum berkaitan dengan tanah adat dan hak ulayat dalam hubungannya dengan investasi terutama dengan program MIFEE (Cepos).

- Masyarakat Dosay mengaku kebijakan respek membingungkan. Hal ini terjadi karena program yang ada telah ditetapkan oleh pemerintah sedangkan masyarakat tinggal melaksanakannya. Padahal ada kebutuhan yang lebih mendesak bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan adanya bentrokan antara warga dengan para pendamping respek (Bintang Papua).

5 Oktober

- Sengketa Pemilukada Keerom dengan registrasi kepaniteraan No 180/ PHPU.D-VIII/2010 akhirnya disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari gugatan pasanga nomor urut 3, Celcius Watae dan Marsudi yang menemukan begitu banyaknya pelanggaran dalam pemilukada Keerom 2010. Sementara itu pasangan Calon Bupati Supiori Julianus Mnusefer dan Theodorus Kawer membawa 17 saksi dan 84 bukti tertulis ke Mahkamah konstitusi dalam sidang pertama dengan agenda pembacaan materi gugatan. Dari Fak-fak juga dilaporkan bahwa Pansus pilkada akan mengambil langkah berkaitan dengan pelanggaran pemilukada berupa pengelembungan suara pasangan Mohamad Ususwanas dan Donatus Nimbitkendrik dan pengurangan suara pasangan Said Hindom dan Ali Baham Tamongmere(Cepos).
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memenangkan gugatan pasagan calon walikota dan

Dipindai dengan CamScanner

wakil walikota Jayapura periode 2010-2015, Julius Mambay dan Paulus Piter Ell. Selain itu juga SK KPU Kota Jayapura No 80 tanggal 7 September 2010 tentang nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dibatalkan (Cepos).

6 Oktober

Sidang dengar pendapat Kongres AS tentang Papua sangatlah berharga bagi orang Papua. ini merupakan yang pertama dalam 48 tahun, masalah papua dibahas di tingkat international. Pada kesempatan itu para wakil Papua meminta AS mendesak Indonesia untuk membuka dialog membahas otonomi khusus Papua yang telah gagal dan ditolak orang Papua. Upaya dialog yang sejajar akan terus diperjuangkan, jika tidak hanya satu kemungkinan yang ada yakni merdeka (Cepos).

8 Oktober

Realisasi target program di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Keerom masih rendah. Demikian pula Pendapatan Asli Daerahnya kura masih minim. Dari Rp 20 miliar yang ditargetkan baru terkumpul Rp 7 miliar dari retribusi dan galian C (Cepos).

11 Oktober

Hari ini, 219.786 warga kota mencoblos untuk memilih walikota dan wakil walokota Jayapura periode 2010-2015. Pemilukada ini digelar serempak di 500 TPS. Sementara itu Ketua KPU Kota Jayapura tetap ditahan (Bintang Papua).

12 Oktober

- Anggaran pembangunan pasar mama-mama Papua sudah disiapkan. Ganjalan saat ini ialah penyerahana aset terminal dari Perum Damri Pusat karena di situlah lokasi pembangunan pasar tradisional. Sementara itu

Dipindai dengan CamScanner

pembangunan pasar sementara sudah disiapkan oleh pemda Papua (Cepos).

- Mendagri mengeluarkan SK pelantikan bupati terpilih Boven Digoel yakni Yusak Yaluwo dan Yesaya Merasi periode 2010-2015. Soal status calon bupati terpilih yang masih menjalani sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pelantikan akan tetap dijalankan dengan asas praduga tak bersalah (Cepos).

13 Oktober

Gugatan Pemilukada Kabupaten Keerom ditolak oleh mahkamah Konstitusi. Alasannya, permohonan pemohon tak terbukti secara hukum yakni mobilisasi massa, praktik uang dan dugaan konspirasi penyelenggara pemilu. Maka hasil pemunguntan suara pada 25 Agustus 2010 dinyatakan sah (Cepos).

14 Oktober

Hasil survei Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Madah Jokjakarta soal Respek di beberapa kampung menunjukkan bahwa repek belumlah maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tahapan-tahapan program respek kepada masyarakat di tingkat kampung. Misalnya pembangunan yang dilakukan di kampung bukan karena kemendesakan tetapi karena ditentukan oleh suara terbanyak (Cepos).

18 Oktober

Hari ini pemilkada Kabupaten Pegunungan Bintang digelar. Tercatat 78.410 pemilih yang akan menyalurkan hak suaranya. Adapun pasangan calon Bupati dan wakil bupatinya adalah:

Dipindai dengan CamScanner

Calon Bupati - Wakil Bupati Pegunungan Bintang
1. Drs.WL Wenda - Yakobus Wayam
2. Aloysius Yopeng - Orgenes Ibo
3. Engelbertus Kasibmabin - Stanis Kasipdana
4. H.Uropmabin - Agus Hermawan
5. Constan Oktemka - Selotius Taplo
6. Theodorus Sitokdana - Andi Balio

21 Oktober

Permohonan pasangan Mnusefer-Kawer dikabulkan oleh Mahakamah Konstitusi. Dengan demikian mereka akan ikut dalam pemilukada Supiori putaran kedua nanti. Sementara itu, KPU Supiori diminta untuk merevisi SK No 183 hasil pleno penetapan perolehan suara tanggal 20 September 2010 lalu (Cepos).

22 Oktober

Pemungutan suara ulang di TPS 7 dan TPS 8 di kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura kemarin diwarnai oleh aksi pemalangan dan mobilisasi massa. Massa datang dari Doyo Baru dan Koya Koso. Akan tetapi kedua aksi ini dapat diamankan oleh aparat. Selain itu, mekanisme pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan prosedur pemilukada. TPS yang seharusnya dalam keadaan terbuka malah ditutup dan hanya terdapat pintu keluar-masuk. Selain itu terkesan sudah disetting karena dibelakang pemilih berdiri oknum tertentu yang memberikan arahan untuk mencoblos pasangan tertentu (Cepos).

23 Oktober

Pasangan Calon Walikota dan Wakil walikota, BTM-Alam dan JHH-LLA melaju ke putaran kedua. Berdasarkan pleno rekapitulasi perolehan suara akhir, tidak ada satu pun pasangan yang mencapai 30 persen plus 1 suara sah. Karena

Dipindai dengan CamScanner

dua pasangan tersebut mempunyai jumlah suara terbanyak maka merekalah yang berhak melaju ke putaran kedua (Cepos).

1 November

- Kelompok Intelektual Anak Adat Asli Keerom berpendapat bahwa Pemilukada Keerom belum final karena banyak terjadi kesalahan fatal. KPU Keerom tidak dapat menyelesaikan persoalan dan pelanggaran kode dan administrasi. Mereka meminta agar DPRD Keerom tidak melakukan sidang pleno pelantikan bupati dan wakil bupati (Bintang Papua & Cepos).
- Pencairan dana hibah KPU Kota Jayapura dalam Pemilukada Kota Jayapura tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Dana Hibah KPU (Bintang Papua).
- Kepala Bagian Operasi Wilayah VIII PT Jamsostek, Tenang Simbiring mengungkapkan sejak Januari – September 2010, pihak Jamsostek telah memberikan jaminan dan santunan kepada peserta Jamsostek di Merauke sebesar 1,3 miliar (Cepos).

3 November

Ketua DPRD Waropen, Penehas Hugo Tebay meminta kepada Gubernur Papua untuk menunda pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Yesaya Buinei dan Yeremias Bisay. Penundaan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (Bintang Papua).

4 November

- Anggota DPR RI Perwakilan Papua Barat, Sofia Popy Maipauw menilai Gubernur Barnabas Suebu telah membuat kegagalan politik, karena memperpanjang keanggotaan MRP sampai 31 Januari. Alasannya

Dipindai dengan CamScanner

karena belum ada Perdasus (Cepos).

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura mensahkan 6 Raperda menjadi Perda. Keenam Perda tersebut adalah, Perda tentang pengelolaan Barang Daerah Kota Jayapura, Rencana Detail Tata Ruang Distrik Jayapura Selatan, Rencana Induk Jaringan Jalan Kota Jayapura, Rencana Induk Drainase Kota Jayapura, Perubahan Nomenklatur Dinas Perikanan Kota Jayapura dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura (Cepos).

5 November

Kejaksaan Negeri Merauke terus mengumpulkan keterangan terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan bibit sebesar 900 juta (Cepos).

6 November

- Sebanyak 93.483 daftar pemili tetap akan kembali menyalurkan suaranya dalam Pemilukada ulang di Merauke (Cepos).
- Pembangunan kantor bupati Biak direncanakan dalam tiga tahap dan menelan biaya sebesar 40 miliar (Cepos).
- Kepemimpinan MRP tiga bulan ke depan dikukuhkan dalam Sidang MRP. Agus Alua, Frans Wospakrik dan Hanna Hikoyabi masih diberikan kesempatan untuk memimpin MRP (Bintang Papua).

8 November

Ramses Wally, mantan anggota DPRP mengatakan molornya pembahasan Raperdasus 11 kursi DPRP untuk orang Papua semakin menegaskan bahwa stigma separatis belum hilang (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

9 November

- Pemerintah Provinsi Papua berusaha menyelesaikan proyek 5 unit rumah biogas di empat kabupaten yakni, Kota Jayapura 1 unit, Kabupaten Keerom 2 unit, Kabupaten Jayapura 1 unit dan Kabupaten Nabire 1 unit (Cepos).
- Ketua Komisi B DPRD Kota Jayapura, Yacok Ingratubun mempertanyakan sistem dan mekanisme penyaluran minuman beralkohol. Berdasarkan temuan di lapangan penyaluran tidak sesuai dengan Perda Kota Jayapura tentang minuman beralkohol yang tertuang dalam Keputusan Walikota No 2,3 dan 65 tahun 2010 (Cepos).
- Sepanjang 2010 KPU Pusat melalui KPU Provinsi telah memecat sedikitnya 24 anggota KPU kabupaten/kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (Cepos).
- Pelantikan bupati dan wakil bupati Asmat yang terpilih Yuvensius A Biakai dan Motong Saridjan (Cepos).
- Pemerintah Kabupaten Jayapura mempersiapkan tahapan untuk pemberhentian Forkorus Yoboisembut dari PNS (Bintang Papua).
- Pemasokan Miras oleh ketiga CV yakni, Sumber Makmur Jaya, Jaya Makmur dan Seman Makmur harus dilakukan pelaporan secara berkontinyu terkait administrasinya (Bintang Papua).

10 November

- Panitia Khusus Papua yang dibentuk oleh DPD RI beberapa waktu yang lalu mengandekan untuk pergi ke Kantor PBB di Amerika Serikat. Menurut Paulus Sumino maksud kepergian Pansus Papua DPD RI ke PBB untuk mempertanyakan status Papua di PBB (Cepos).
- Bupati dan Wakil Bupati Asmat periode 2010 – 2015,

Dipindai dengan CamScanner

Yuvensius A Biakai dan Motong Saridjan dilantik oleh Gubernur Papua, Barnabas Suebu pada tanggal 9 November 2010 di Lapangan Yos Sudarso, Agats (Cepos).

- Ketika memperingati Hari Pangan Nasional 2010 di Kampung Bokem, Distrik Rimba Jaya, Kabupaten Merauke Sekda Kabupaten Merauke, Josef Rinta menyampaikan Merauke bertekad merealisasikan program MIFEE (Bintang Papua).

11 November

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Keerom dan Gubernur tidak akan melakukan pelantikan bupati dan wakil bupati Keerom karena harus menunggu hasil investigasi mafia hukum terkait makelar kasus yang terjadi. Dari hasil tim investigasi yang dilakukan oleh Rafli Harun diketahui bahwa ada yang menyuap ke MK sebesar 20 miliar yang dilakukan oleh salah satu calon bupati (Bintang Papua).
- Badan Legislasi DPRP masih menunggu naskah akademik untuk segera mensahkan Rapedasus pemilihan anggota MRP (Bintang Papua & Cepos).
- DPRD Kota Jayapura masih menunggu hasil keputusan MK terkait gugatan beberapa kandidat Pemilukada Kota Jayapura dilakukan dua putaran. Konsekuensinya adalah legislatif dan eksekutif harus berkoordinasi untuk menentukan anggaran Pemilikada yang kedua (Bintang Papua).
- Pasangan calon bupati dan wakil bupati Supiori H.J Rumkabu dan Marinus Maryar tetap melakukan gugatan ulang agar keputusan MK dapat ditinjau ulang (Cepos).
- Anggota Kaukus Parlemen Papua Sofia Maipau menyerahkan draf Perdasus MRP kepada Wakil Ketua

Dipindai dengan CamScanner

Badan Legislasi DPRP Albert Bolang di Ruang Baleg DPRP Jayapura (Bintang Papua).

12 November

- Tokoh Intelektual anak adat Asro, Piet Gusbager dan Charles Tafor menilai jadwal pelantik bupati dan wakil bupati Keerom yang dilaksanakan hari ini dinilai merusak hukum pemerintahan. Pelantikan yang dilaksanakan pada hari sabtu yang bukan jam kerja (Bintang Papua).
- Ketua KPU Provinsi Papua, Benny Sweny bersama anggota KPU Pusat Koordinator Papua, I Gusti Putu Arta mendampingi 15 anggota DPRP menemui KPU Pusat. Mereka meminta kepada KPU Pusat untuk menunda tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua sampai adanya putusan MK terhadap judicial review terkait sistem dan mekanisme pelaksanaan Pemilukada tersebut (Cepos).
- DPD RI dan DPRP melakukan pertemuan untuk mensinkronkan berbagai agenda DPD RI dengan DPR Papua terkait tugas Pansus Papua (Cepos).
- Gubernur Barnabas Suebu melantik pejabat Bupati Dogiyai, Gervasius Dogomo dan Helly Weror di Gedung Negara Dok V Jayapura. Pelantikan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 12 November 2010 (Cepos).

15 November

Kaukus Parlement Papua ke MRP untuk mendiskusikan rancangan tambahan Raperdasus yang diusulkan oleh DPD RI (Bintang Papua).

16 November

- Ribuan massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Merauke, Romanus Mbraka dan Sunarjo

Dipindai dengan CamScanner

menggelar aksi demo damai. Massa meminta agar pasangan yang menang ini segera dilantik yakni tanggal 11 desember 2010 (Bintang Papua & Cepos).

- Papua Corruption Watch tidak menyetujui perjalanan dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan sejumlah anggota DPRP ke Israel. Menurut Rifai Darus Koordinator PCW patut dipertanyakan darimana sumber anggaran yang digunakan untuk kepentingan perjalanan dinas (Cepos).
- Sebanyak 7 Raperdasus akan dibawa ke dalam Sidang Paripurna DPRP untuk disahkan. Ketujuh Raperdasus tersebut adalah:
  1.Raperdasus Pemilihan anggota MRP,
  2.Tata Cara Pembentukan Perdasi dan Perdasus di Papua,
  3.Pengangakatan 11 kursi
  4.Penanggulangan HIV AIDS
  5.Perlindungan terhadap Perempuan dan Korban Pelanggaran HAM
  6.Pembangunan di Bidang Kesehatan
  (Cepos).

18 November

- Kejaksaan Tinggi Papua sedang menangani 60 kasus tindak pidana korupsi. 10 kasus ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Papua dan 50 kasus oleh 10 Kejaksaan Negeri yang tersebar di kabupaten dan kota di Provinsi Papua (Bintang Papua).
- Anggota DPRP mengancam mengadukan Koordinator PCW ke kepolisian karena dianggap telah menyebarkan fitnah terkait perjalanan dinas DPRP ke Israel yang menggunakan dana APBD Provinsi tahun 2010 (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

- Meski berstatus terpindana, namun calon Bupati Boven Digoel Yusak Yalumo tetap dilantik oleh Gubernur Barnabas Suebu (Bintang Papua).
- Gubernur Barnabas Suebu melantik Bupati dan Wakil Bupati Waropen periode 2010 – 2011, Jesaya Buinei dan Yeremias Bisai (Cepos & Bintang Papua).

20 November

- Pemerintah Kota Jayapura mengucurkan dana sebesar 300 juta untuk membantu KPU Kota Jayapura dalam menghadapi proses persidangan sengketa Pemilukada Kota Jayapura di MK (Cepos).
- Rencana pelantikan Bupati Boven Digoel, Yusak Yalumo oleh Gubernur Barnabas Suebu sepertinya batal karena surat izin untuk mengeluarkan Yusak Yalumo dari tahanan belum dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta (Cepos).
- Pemilihan umum kepala daerah ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen digelar. Pemilih yang terdaftar dalam Pemilukada ulang sebanyak 62.948 pemilih (Bintang Papua).
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan membuka pertemuan BEM se nusantara di Auditorium Uncen (Bintang Papua).

24 November

- Kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yodhoyono disesalkan oleh DPRP karena tidak membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua (Bintang Papua).
- Dewan Adat Papua tidak mengikuti acara tatap muka dengan Presiden RI namun pihak DAP merasa tenang karena aspirasinya telah disampaikan oleh mahasiswa. Aspirasi DAP tersebut adalah, hasil evaluasi MRP dan

Dipindai dengan CamScanner

orang Papua tentang penerapan Otsus yang gagal (Bintang Papua).

25 November

- Gubernur Papua Barnabas Suebu membentuk Forum Komunikasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Daerah (Forkom Cetas Tipikorda) dinilai sebagai salah satu untuk pencegahan korupsi di daerah (Cepos).
- Pendapatan asli daerah Biak memenuhi target bahkan mengalami over target. Realisasi PAD Biak tahun 2010 telah mencapai 14,6 miliar (Cepos).
- Sorpatom menggelar aksi demo damai menolak program MIFEE di Merauke (Cepos).

26 November

Mahkama Konstitusi akhirnya memutuskan Pemilukada Kota Jayapura diulang lagi (Cepos).

27 November

Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRP Papua. Mereka meminta kepada Presiden RI untuk menutup proyek MIFEE tersebut. Aksi unjuk rasa ini dikoordinator oleh Diana Victoria Gebze (Cepos).

30 November

- Walaupun ditolak oleh Fraksi Pembaharuand an Nusantara, RAPBD Kota Jayapura tahun 2011 tetap disahkan menjadi APBD tahun 2011. Tabel data APBD Kota Jayapura tahun 2011

Dipindai dengan CamScanner

Sumber Pendapatan	(Rp)
PAD	56.500.000.000
Dana Perimbangan	489.389.339
Lain-lain Pendapatan yang sah	127.866.883.000
Belanja Tidak Langsung	376.378.561.785
Belanja Langsung	308.017.660.215
Total Belanja keseluruhan	680.756.222.000
Defisit	7.000.000.000

(Cepos).

·Gubernur Barnabas Suebu melantik Pejabat Bupati Pegunungan Bintang, Max Kambuaya dan Pejabat Bupati Puncak, Ricky D. Ambrauw (Cepos).

1 Desember

Dari 8 Raperdasus dan Raperdasi yang disiapkan oleh DPRP namun hanya 5 Raperdasus dan Raperdasi yang dibahas. Kelima Raperdasus dan Raperdasi tersebut adalah: Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP periode 2010-2015, tentang pelayanan kesehatan, tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS, tentang tata organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah dan tentang pembentukan raperdasi dan raperdasus (Cepos).

3 Desember

Dalam pembahasan Raperdasus dan Raperdasi di DPRP, salah satu point yang diangkat adalah, MRP hanya satu saja untuk dua propinsi yakni, Papua dan Papua Barat (Cepos).

9 Desember

· Simposium di Hotel Sanghai Jakarta tentang Grand Design Concept of Authonomous Territory Management in Papua menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kementrian Dalam Negeri RI, Hermanzyah Johan sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri bahwa sebanyak 80 % daerah otonom yang selama ini dimekarkan kinerjanya jelek dari segi pemerintahannya dan pelaksanaan pembangunannya (Cepos).

Anggota DPRD Mimika mengadakan studi banding ke Batam selama tiga hari untuk meninjau lokasi pelabuhan dan pergudangan yang ada di Batam (Cepos).

10 Desember

Romanus Mbaraka dan Sunarjo akhirnya dinyatakan sebagai pemenang Pemilukada di Merauke berdasarkan putusan MK (Cepos).

11 Desember

Penyelewengan dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jayapura kepada KPU Kota Jayapura dalam proses penyelidikan Kejaksaan Negeri Jayapura. Dana sebesar 3,2 miliar disalahgunakan oleh KPU Kota Jayapura (Bintang Papua).

15 Desember

Sekitar 50-an kepala kampung perwakilan dari 86 kepala kampung se Kabupaten Sarmi memalang jalan menuju kantor bupati Sarmi. Aksi ini disebabkan honor kepala kampung belum dibayar (Bintang Papua).

17 Desember

Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat akan mensosialisasikan Perdasus Pemilihan Anggota MRP di 40 kabupaten/kota se Papua (Cepos).

18 Desember

Para calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Nduga: Yakoba Lokbere & Thomas Ameng, Alpius Lokbere & Dinard Kelnea,

Dipindai dengan CamScanner

Edison Ngijangge & Ellaser Tabuni, Yairus Gwijangge & F A Krisantus dan Isak Dimiye & Hernice Maria Pijoh (Cepos).

20 Desember

Ketua MRP, Agus Allua mengatakan perlu adanya Perdasus Miras dan Seks untuk menjaga orang Papua dari kehancuran (Cepos).

22 Desember

Papua Corruption Watch menilai negatif terhadap kinerja Gubernur Barnabas Suebu dalam upaya pemberantasan korupsi di Papua. Hal ini terlihat dengan belum adanya kebijakan konkrit dalam pemberantasan korupsi di Papua (Bintang Papua).

23 Desember

Pengembalian uang reses dan kunjungan kerja dari DPRP ke kas negara diprotes oleh anggota DPRP. Salah seorang anggota DPRP, Deerd Tabuni melakukan protes terhadap kebijakan ini (Cepos & Bintang Papua).

24 Desember

- Protes keras yang dilayangkan oleh anggota DPR Papua Deerd Tabuni terkait dana Kunker DPR Papua dimasa reses 2010 ini (Cepos).
- Sekretaris Daerah Provinsi Papua drh. Constant Karma menilai protes tersebut tidak berdasar bahkan mengarah pada penipuan, karena isi surat edaran tidak seperti itu (Cepos).

30 Desember

Gubernur Provinsi Papua Bernabas Suebu dijadwalkan siang ini, akan menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan DPA (Documen Pelaksanaan Anggaran) tahun 2011 kepada bupati/walikota serta unit satuan kerja di Gedung

Dipindai dengan CamScanner

Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua Dok II Jayapura. Penyerahan ini lakukan setelah gubernur bersama dengan Sekda provinsi papua Constant Karma menerima DIPA dari Presiden bersama Gubernur dan Sekda dari provinsi lainnya di Jakarta (Cepos).

31 Desember

- Dana yang akan dicairkan untuk Papua pada tahun 2011 adalah 28 triliun. Hal in terungkap dalam acara penyerahan DIPA dan DPA 2011 kepada bupati/walikota serta unit satuan kerja (Cepos).
- Dana sumbangan sebesar 2 miliar untuk bencana banjir Wasior, Kabupaten Teluk Wondana dipertanyakan oleh Kementrian Sosial. Kementrian mengharapkan laporan penggunaan dana bantuan tersebut (Cepos).

E. Konflik, Damai dan Rekonsiliasi

5 Januari

Dua kelompok suku yakni Dani dan Damal yang bermukim di Kampung Kwamki Lama Mimika terlibat dalam bentrokan. Kejadian ini disebabkan masalah perselingkuhan (Bintang Papua).

9 Januari

Aksi saling serang antar kedua suku di Kwamki Lama, Mimika belum berakhir. Kejadian ini telah memakan korban sebanyak 70 orang dan 1 telah meninggal (Bintang Papua & Papua Pos).

10 Januari

Pihak kepolisian diminta dapat menegakkan hukum bagi warga yang terlibat kasus pertikaian di Kwamki Lama. Pernyataan ini disampaikan oleh anggota DPRD Mimika, Elminus Mom (Papua

Dipindai dengan CamScanner

Pos).

12 Januari
Aparat keamanan telah dan terus mengupayakan negosiasi dengan warga yang terlibat dalam peperangan di Kwamki Lama Mimika. Namun warga sendiri berkeinginan menyelesaikan permasalahan dengan adat mereka yakni dengan perang (Papua Pos).

13 Januari
Penyelesaian pertikaian di Kwamki Lama, Mimika tidak harus mengikutsertakan pihak ketiga dalam hal ini PT Freeport. Karena pertikaian ini tidak berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh tokoh perempuan dan anggota DPRD Mimika, Anastia Tekege. Selain itu juga DPRD Mimika akan membentuk tim khusus (Bintang Papua & Papua Pos).

14 Januari
Aparat Polres Mimika dan Brimob Detasemen B Papua berhasil menangkap para kepala perang di Kwamki Lama (Papua Pos).

15 Januari
Masyarakat menilai perdamaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dipaksa, apalagi pihak aparat menangkap para kepala perang (Papua Pos).

16 Januari
Komisi I DPR RI dalam kunjunga kerja ke Provinsi Papua menyetujui dilakukan dialog nasional antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat (Papua Pos).

21 Januari
Dua kelompok warga yang bertikai di Kwamki Lama menggelar prosesi adat perdamaian yang ditandai dengan mematahkan

Dipindai dengan CamScanner

busur dan anak panah (Bintang Papua & Papua Pos).

23 Januari

- Pejabat PT Freeport dipanggil Komnas HAM terkait konflik di Papua dan aliran dana untuk masyarakat Papua (Papua Pos).
- Masyarakat Paniai di Mimika mendatangi Kantor DPRD Mimika untuk menyampaikan aspirasi terkait kematian Isodorus Edoway (Siswa SMP) (Papua Pos).

25 Januari

Peristiwa penembakan kembali terjadi di areal Freeport. Penembakan ini dilakukan oleh orang yang tak dikenal. Penembakan ini menyebabkan 9 orang tertembak, 5 orang karyawan dan 4 anggota brimob (Bintang Papua).

26 Januari

- Dewan Adat Papua menanggapi kasus penembakan di areal Freeport, DAP meminta TNI dan Polisi di sepanjang areal Freeport ditarik untuk sementara guna mencari tahu siapa pelaku penembakan tersebut (Bintang Papua).
- Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay mendesak aparat kepolisian agar segera mengungkapkan pelaku penembakan di areal Freeport (Bintang Papua).

27 Januari

Kalangan DPRD Mimika mempertanyakan pengamanan di areal Freeport seiring peristiwa penembakan terhadap bus karyawan. DPRD Mimika menilai pengamanan yang dilakukan masih lemah. Selain itu masyarakat Mimika menjadi bingung adanya penembakan di areal Freeport (Papua Pos).

3 Februari

Dipindai dengan CamScanner

Sekitar 500 karyawan Freeport menggelar aksi demo damai dengan doa bersama di alun-alun Mile Post 68. Aksi ini untuk mengenang teror penembakan yang selama ini terjadi di areal Freeport (Papua Pos).

8 Februari
Warga petani Tanah Hitam, Distrik Abepura kembali diteror oleh orang yang tak dikenal (Bintang Papua).

11 Februari
Kantor Polres Jayapura dirusak oleh massa. Pengrusakan dan penyerangan oleh massa ini terkait dengan pembunuhan terhadap Willy Aud di Jalan Kebun BTN Sinpama, Kelurahan Dobonsolo Yahim, Distrik Sentani (Bintang Papua).

12 Februari
Penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Willy Aud diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak pelaku harus membayar 200 juta (Bintang Papua).

16 Februari
Seorang anggota Brimob Polda Papua, Briptu Suhrul meninggal karena ditusuk. Berita meninggalnya Suhrul masih simpan siur, ada yang mengatakan bahwa ditembak oleh OPM dan informasi yang lainnya korban tewas akibat ditusuk di bagian lehernya (Bintang Papua & Papua Pos).

17 Februari
Pihak kepolisian akan terus menelusuri pembunuhan terhadap anggota Brimob Suhrul di Puncak Jaya. Pihak kepolisian menduga keterlibatan OPM di dalam pembunuhan tersebut (Bintang Papua).

20 Februari
Ketua Esekutif Nasional Front Perjuangan Papua Barat, Selivus

Dipindai dengan CamScanner

Bobii mengatakan harus ada Pengadilan HAM di Papua karena begitu banyak pelanggaran HAM terjadi di Papua (Papua Pos).

1 Maret

Rencana dialog Papua – Jakarta dalam rangka menyelesaikan konflik di Papua pada saat ini sedang melakukan konsolidasi ke kabupaten-kabupaten di Papua. Hal ini dilakukan untuk menampung pendapat dan pandangan rakyat tentang perlunya dialog tersebut (Papua Pos).

24 Maret

Seorang Napi LP Abepura, Faskalius Fatubun dianiaya oleh seorang petugas LP, akibatnya Fatubun mengalami luka yang cukup serius (Papua Pos).

25 Maret

Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Biak Numfor telah menangani 32 kasus tindak pidana kriminal selama priode Januari – Maret 2010. Dari 32 kasus ini sebagian besar menyangkut kasus penganiayaan (Papua Pos).

29 Maret

Forum LSM Biak Numfor menggelar acara konsultasi publik berupa dialog warga Propinsi Papua dengan Jakarta. Acara ini diikuti oleh 50 elemen masyarakat yang ada di Biak (Papua Pos).

10 Mei

Kepala Dinas Perlindungan Masyarakat Kesatuan Bangsa, Jan P Sondakh meminta masyarakat di Kabupaten Jayapura untuk tetap menjaga kerukunan hidup antar agama sehingga Papua sebagai wilayah zona damai tetap terjaga dan kondusif (Cepos).

6 Juni

Dipindai dengan CamScanner

Ketua Elsham, Ferry Marisa mendesak pemerintah bertanggung jawab menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga mengurangi jumlah pasukan ke Papua (Cepos).

3 Juli
Sejak penyerangan Pos Polisi oleh TPN OPM di Tingginambut, pembangunan di Puncak Jaya sampai saat sekarang ini masih tertutup. Begitupula dengan kegiatan persekolahan (Bintang Papua).

13 Juli
Puluhan Napi Lapas Kelas IIA Abepura mengamuk dan memukuli penjaga Lapas karena petugas tersebut menyita uang milik seorang Napi sebesar 9,8 juta (Bintang Papua).

14 Juli
Pasca bentrokan pada tanggal 10 juli di Karubaga, Tolikara terjadi bentrok susulan yang mengakibatkan 2 orang meninggal (Cepos & Bintang Papua).

19 Juli
Dua kelompok warga yang bertikai di Kabupaten Tolikara akhirnya bersepakat damai. Hal ini ditunjukkan dengan pematahan anak panah oleh Bupati Jhon Tabo yang disaksikan oleh kedua kelompok warga tersebut di Lapangan Merah Putih Karubaga (Cepos).

23 Juli
Kelompok OTK kembai menjalankan aksinya di Kampung Kalome, Puncak Jaya. Mereka membakar 3 unit kendaraan yang melakukan perjalanan menuju Mulia (Cepos).

9 Agustus
Panggilan terhadap Duma Sokrates Sofyan Yoman dari Polda Papua berkaitan dengan pernyataannya yang memojokkan

Dipindai dengan CamScanner

aparat TNI tentang kasus di Puncak Jaya tidak digubriskan oleh Sokrates. Sokrates mengatakan bahwa jangan pernah berpikir bahwa TNI/Polri adalah pemilik kebenaran atau segala-galanya (Bintang Papua).

13 Agustus

Pemanggilan terhadap Sofyan Sokrates Yoman oleh pihak Polda Papua terkait pernyataannya terhadap TNI/Polri mengundang reaksi dari pihak gereja. Sebagai bentuk keprihatinan Gereja akhirnya menyerukan dialog nasional. Pernyataan ini dikeluarkan dari hasil sidang para petinggi Gereja di Tanah Papua, yakni Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pdt. Jemima J Mirino Krey, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt. Lipius Biniluk, Ketua Sinode Kingmi Tanah Papua Pdt. Beny Giay, Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Pdt. Andreas Kogoya dan Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Lajar, ofm (Bintang Papua).

31 Agustus

Kasus tewasnya Opinus Tabuni pada acara Peringatan Hari Pribumi Sedunia di Wamena sampai saat sekarang belum jelas pengungkapan pelaku pembunuhan tersebut. Theo Hesegem (Ketua Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah) mempertanyakan proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian (Bintang Papua).

1 September

Stigma makar, separatis dan OPM adalah upaya pembungkaman. “DPRD Provinsi Papua harus mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghapus stigma makar dan separatis bagi orang Papua, “demikian diungkapkan Johanis H Maturbongs, dari tim Advokasi dan penegakan HAM Papua. bahwasannya, apa yang diungkapkan masyarakat papua adalah bagian dari kebebasan pers yang dijamin undang-undang (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

2 September
Dialog Jakarta-Papua perlu segera dilakukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Papua dan mencairkan kebuntuan pelaksanaan UU Otsus no.21 tahun 2001. "Perlu komunikasi konstruktif antara masyarakat Papua dengan pemerintah pusat, diperlukan ruang dialog sehinggga ada titik temu bagaimana masyarakat Papua bisa tenang hadapi kehidupannya ke depan,"ungkap Ketua DAP Biak, Yan Pieter Yarangga (Bintang Papua).

15 September
Dialog Jakarta-Papua yang tengah digagas oleh LIPI ditolak oleh SBY karena dinilai berbau politik dan membahayakan eksistensi negara. Presiden lebih memilih komunikasi konstruktif dengan Papua dalam kerangka evaluasi otsus sebagai bentuk dialog untuk membangun Papua yang lebih baik (Bintang Papua)

16 September
Tawaran komunikasi konstruktif SBY disambut baik oleh salah satu pengagas Dialog Jakarta-Papua, P.Neles Tebay, Pr. Menurutnya hal ini menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap orang Papua. Akan tetapi perlu diberi penjelasan lebih lanjut akan apa yang dimaksudkan dengan "komunikasi Konstruktif". Artinya format serta siapa yang akan melakukan komunikasi itu jelas agar diketahui semua pihak di Papua. selain memantau niat baik ini, pihaknya bersama LIPI akan tetap upaya yang telah dirilis dan terus melakukan konsultasi publik (Bintang Papua).

25 September
Tokoh Agama dari Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu dan Budha di Papua wajib menyebarkan perdamaian. Hal ini diungkapkan dalam pertemuan dengan menteri Agama, Bahrul Hayat. Menteri mengajak para tokoh agama agar membangun

Dipindai dengan CamScanner

kerukunan antar agama terutama karena sikap saling curiga mengancam perdamaian antar agama(Cepos).

30 Oktober

Kasus pelanggaran HAM di Papua disebabkan oleh penegakan hukum yang tidak jelas atau tidak berjalan. Menurut, John Djonga Pr, "semua peristiwa itu terjadi selain karena ketidakadilan, ketidakseimbangan itu juga adalah persoalan Sumber Daya manusia pada masyarakat maupun aparat." Apabila pemerintahan yang tak berpihak kepada masyarakat ini terus terjadi dan hukum tidak berjalan maka masyarakat akan bergerak dengan cara mereka sendiri pula. Oleh karena itu reformasi hukum dan reformasi militer perlu segera dilakukan (Bintang Papua).

4 November

Ketua Komnas HAM Papua, Jules Ongge mengungkapkan sejak bulan Februari hingga saat kini Komnas HAM telah menerima 6 kasus pengaduan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Jayapura (Cepos).

6 November

Agen Pugo Kiwo, salah satu korban penyiksaan oleh oknum TNI di Tinggi Nambut mengadu ke Komnas HAM (Bintang Papua).

18 November

Konflik yang terjadi di Kampung Yoka diduga dilakukan oleh Warga Pegunungan Tengah menyebabkan banyak rumah yang terbakar. Penyebabnya adalah lagu yang isinya menghina masyarakat Pegunungan Tengah (Cepos).

22 November

Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengeluarkan seruan untuk tetap menjaga suasan kedamaian pasca bentrok di Yoka

Dipindai dengan CamScanner

(Bintang Papua).

24 November

Dewan Adat Papua siap menjadi fasilitator perdamian antara kedua suku dalam kasus penyerangan Kampung Yoka (Bintang Papua).

27 November

Pertikaian di Kampung Yoka diakhiri dengan penandatangan 11 kesepakatan damai dari kedua kelompok masyarakat. Selain masyarakat yang menandatangi, pihak pemerintah Kota Jayapura diwakili oleh Pejabat Walikota, Elieser Renmaur (Cepos).

29 November

Kelompok orang yang tak dikenal kembali beraksi di Jalan Trans Gunung Merah, Kampung Nafri, Abepura. Kelompok ini menembaki menembaki para pengguna jalan yang berkendaraan. Aksi ini menyebabkan satu warga meninggal (Cepos).

30 November

- Pihak kepolisian, Brimob melakukan penyisiran di daerah konflik Nafri. Dari penyisiran ini tidak ditemukan pelaku. Menurut keterangan diduga pelakunya 4-5 orang dengan ciri-ciri berambut gimbal (Cepos).
- Sebanyak 16 kelompok korban pelanggaran HAM yang terdiri dari, Wasior (2 orang), Wamena (2 orang), Timika (2 orang), Biak (2 orang), Sorong (2 orang), Serui (1 orang), Komunitas survivor Abepura (4 orang) dan IKOHIK2N (2 orang) menyimpulkan bahwa selama ini Negara tidak bertanggung jawab atas kasus pelanggaran HAM yang mereka alami (Bintang Papua).

2 Desember

Dipindai dengan CamScanner

Pelanggaran HAM di Papua yang terus meningkat, dinilai oleh DAP bahwa lemahnya kinerja dari Komnas HAM Papua (Bintang Papua).

6 Desember

Penembakan terjadi di daerah Puncak Jaya oleh OTK. Penembakan ini dilakukan terhadap seorang tukang ojek bernama Anas. Pelaku penembakan ini berjumlah 4 orang (Cepos & Bintang Papua).

8 Desember

Terkait kasus pelanggaran HAM di Papua yang belum dibuka dalam bentuk pengakuan dan proses pengadilan kepada para pelakunya, dinilai oleh Solidaritas Korban Pelanggaran HAM Papua dan Kontras bahwa negara tidak melindungi dan menghargai warga negaranya (Cepos).

11 Desember

- Perayaan memperingati upacara Anti Kekerasan Terhadap Papua dilakukan dengan menyalakan 1000 lilin di depan kantor MRP (Bintang Papua).
- Komisi Nasional HAM Papua berkunjung ke Wamena untuk memantau kasus penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan pada perayaan HUT Papua Merdeka di Markas OPM Yagum, Bolakme pada tanggal 1 Desember yang lalu (Bintang Papua).

15 Desember

Tersangka yang membuat kericuhan di Lapas Abepura akhirnya dipindahkan ke tahanan Polda Papua. Mereka adalah, Fillep Karma, Buchtar Tabuni, Dominggus Pulalo, Alex Elopere dan Lopes Karubaba (Bintang Papua).

23 Desember

Dalam jumpa pers yang dilakukan oleh Johanis Maturbongs

Dipindai dengan CamScanner

(Koordinator Kontras), Peneas Lokbere (Koordinator BUK) dan Olga Hamadi (Kontras Papua) menyatakan bahwa praktek penegakan HAM di Papua belum dikelola secara baik. Walaupun sudah ada regulasi yang menjamin HAM, namun diskriminasi dan keberpihakan dari pihak aparat dan pemerintah masih banyak terjadi (Bintang Papua).

F. Otonomi Khusus (Otsus)

4 Januari
Dana Otsus di Kabupaten Mimika senilai 1,1 miliar yang harus digunakan untuk subsidi penerbangan perintis ke Distrik Jila, diduga bermasalah karena dialihkan untuk membeli mobil pejabat Dinas Perhubungan (Bintang Papua).

9 Januari
Dalam acara rekonsiliasi Gerakan Demokrasi Aceh – Papua di Banda Aceh, Jeffrey Papare yang mewakili masyarakat sipil Papua menungkapkan bahwa masyarakat Provinsi Papua belum merasakan hasil Otsus yang diberlakukan pada tahun 2001. Berdasarkan data statistik pusat sekitar 81% masyarakat Papua hidup di bawah garis kemiskinan (Papua Pos).

11 Januari
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua, Achmad Hatari mengatakan dana Otsus bagi Provinsi Papua 2010 mengalami penambahan sebesar 80 miliar, sedangkana dana infrastruktur tetap sama dengan 2009 yakni 800 miliar (Papua Pos & Cepos).

28 Januari
Dewan Perwakilan Derah RI akan segera membuat Pansus untuk menyempurnakan UU Otsus Papua dan Papua Barat (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

4 Maret
Dewan Adat Papua menilai sebagian besar dana Otsus digunakan sebagai alat politik dan kepentingan para pejabat (Papua Pos).

24 Maret
Pencairan dana Otsus yang sebelumnya dicairkan dalam empat tahap namun pada tahun 2010 pemerintah pusat melalui Dirjen Keuangan RI akan mencairkan dana Otsus pertriwulan (Papua Pos).

29 April
Gubernur Papua, Barnabas Suebu mengatakan dari hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten /kota di Papua penyelenggaraan pemerintahannya menunjukkan peningkatan sedangkan pelaksanaan otonomi daerah baru atas 9 kabupaten otonomi daerah baru dilakukan pemerintah pusat berdasarkan pemendagri no. 23/2010 tentang tata cara pelaksanaan evaluasi daerah otonom baru dan juga pelaksanaan bitek ; strategis karena dilaksanakan pada tempat yang tepat (Cepos).

30 Maret
Wacana rekonstruksi UU Otsus kembali digelar oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI Jayapura dengan menghadirkan 3 nara sumber, Yusak Reba (Fakultas Hukum Uncen), Frederik Sokoy (FISIP Uncen) dan Kenny Mayabubun (Aktivis Foker) (Bintang Papua).

21 Mei
Bupati Jayapura, Habel Suwae mengatakan bahwa pembagian dana Otsus perlu dikaji ulang. Sebab, Otsus muncul karena tuntutan masyarakat Papua dan ada perkembangan pemekaran di Papua (Cepos).

Dipindai dengan CamScanner

9 Juni

Massa mendatangi gedung DPRD Biak Numfor meminta implementasi Otsus secara menyeluruh. Massa ini dipimpin oleh Adol Baransano dan ada tiga hal yang disampaikan: pertama, pengimplementasian Otsus secara sungguh-sungguh tanpa diboncengi kepentingan politik. Kedua, SK no. 14 MRP tentang bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota harus orang asli Papua juga diakomodir. Ketiga, mengejar oknum pelaku penembakan di Puncak Jaya harus mengedepankan pendekatan persuasif dalam menyelesaikannya tanpa mengorbankan masyarakat umum (Cepos).

11 Juni

- Keberpihakan Otsus bagi pengusaha asli Papua belum nyata. Sebab, nyatanya selama ini, pengusaha-pengusaha produktif dikuasai oleh pengusaha pendatang-non Papua. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Provinsi Papua Bidang Pengembangan Pengusaha Orang Asli Papua, Aples Numberi (Cepos).
- Pertemuan di Gedung MRP selama dua hari diikuti oleh masyarakat asli Papua. mereka meminta agar Otsus dikembalikan karena dinilai tidak berhasil. Dalam pertemuan tersebut membentuk tujuh komisi untuk membahas berbagai persoalan yang terjadi selama berlakunya Otsus 2001-2010; komisi kelembagaan, kebijakan otsus, HAM dan sosial-ekonomi dan budaya, komisi identitas, pengembangan karakter persatuan dan leadership serta komisi perempuan dan anak serta persoalannya dan komisi SK MRP no. 14/2009 dan komisi rekomendasi (Cepos).

19 Juni

Ribuan masyarakat asli Papua dari berbagai golongan, baik

Dipindai dengan CamScanner

mahasiswa, LSM, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh adat dan organisasi kelembagaan menggelar demo damai ke gedung DPR dalam rangka menolak Otsus yang dinilai gagal dan meminta referendum (Cepos).

26 Juni

Gubernur Barnabas Suebu menanggapi aksi demo tentang Otsus. Menurut Suebu Otsus tidak gagal karena langsung ke kampung-kampung (Bintang Papua).

5 Juli

- Sekretaris Jendral Presidium Dewan Papua, Thama Alhamid, mengatakan isu tentang OPM merupakan upaya dari pemerintah untuk mengalihkan isu kegagalan Otsus di Papua (Bintang Papua).
- Meskipun sudah memasuki tahun ketiga, realisasi program Respek belum nampak kepada kaum perempuan di Kabupaten Asmat. Dari kunjungan Turkam Wakil Gubernur Paspua, Alex Hesegem, di Distrik Akast, Kabupaten Asmat, terungkap dana Respek 15 % kepada perempuan tidak diberikan. Menurut pendamping Respek 15 di Kabupaten Asmat Yosef Sayory, bantuan dana Respek dari Pemerintah Provinsi Papua sebesar 100 juta, sudah diatur sesuai dengan prosedur. Dimana tahun 2008, sebayak 15 % dana Respek bagi perempuan atau mama di kampung sudah diberikan. Digunakan untuk Koperasi simpan pinjam, namun tidak terlaksana dengan baik (Cepos).

6 Juli

- Dewan Perwakilan Rakyat Papua tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan 11 item rekomendasi MRP antara lain mendesak untuk segera dilakukan

Dipindai dengan CamScanner

referendum. Badan Eksekutif yang melanjutkannya ke pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I MRP Yunus Wonda Senin (5/7) terkait aksi unjuk rasa besar-besaran dari masa MRP pada Kamis (8/7) (Bintang Papua).

- Gubernur Papua, Bernabas Suebu menegaskan, bahwa program Respek yang berjalan sejak tahun 2007 hingga kini bukan proyek. Tetapi suatu gerakan pembangunan dari bawah atau dari masyarakat dan untuk masyarakat (Cepos).

7 Juli

- Aksi demo penolakan UU Otsus Papua dan menuntut segera referendum yang dilakukan Juni lalu di gedung DPR Papua, dipastikan akan kembali dilakukan Kamis (8/7) besok di tempat yang sama. Penanggung jawab aksi 8 Juli Salmon M. Yamame mengatakan aksi Juli akan tetap digelar (Bintang Papua).
- Demo anarkis akan ditindak tegas oleh pihak keamanan. Hal ini disampaikan oleh Kapolda Papua, Irjen Pol. Bekto menyikapi rencana digelarnya aksi demonstrasi penolakan Otsus dan tuntutan Referendum 8/7 (Cepos).
- Wakil Gubernur Papua, Alex Hesegem mengatakan Respek merupakan program primadona untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan program Respek sebagai salah satu program primadona untuk pemberantasan kemiskinan masyarakat di Provinsi Papua. Hal ini disampaikan ketika Alex Hesegem melakukan turkam ke Kabupaten Nduga (Cepos).

13 Juli

Dipindai dengan CamScanner

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Merauke, Bappeda dan jajarannya mengadakan pertemuan untuk membahas alokasi dana Otsus di tahun 2011 bagi Kabupaten Merauke. Dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan untuk pengalokasian dana Otsus dititikberatkan pada pendidikan (Cepos).

14 Juli

Menteri Koordinator Bidang Politk, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengatakan terkait permintaan refrendum dan penolakan Otsus akan dievaluasi DPRP Papua. Sebenarnya masyarakat Papua menuntut kesejahteraan (Bintang Papua).

17 Juli

Mentri Dalam Negri Gamawan Fauzi mengatakan kebijakan Otsus Papua merupakan kebijakan yang sudah final. Fauzi sendiri tidak tahu hal apa yang dipersoalkan dengan Otsus Papua. Menurutnya UU no 21 2001 telah memberikan hak-hak yang bersifat khusus kepada Papua (Cepos).

19 Juli

Koordinator Program ICS, Yusak Reba menilai bahwa isi UU Otsus tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi politik dan perubahan pemerintah saat kini (Cepos).

20 Juli

- Dialog yang bertemakan peran pemuda dalam memaksimalkan Otsus Papua berlangsung di Aula USTJ Padang Bulan (Bintang Papua).
- Ruben Magai, Ketua Komisi A DPRP menanggapi pernyataan Mendagri bahwa UU Otsus memang sudah final namu penyelenggaraan pemerintahan belum final bahkan dinilai masih sebatas label (Cepos).
- Kaukus Parlemen Pegunungan Papua mengancam walk out dalam sidang pembahasan APBD Provinsi Papua

Dipindai dengan CamScanner

jika dana Otsus untuk Pegunungan Tengah tidak dinaikan menjadi 70 % (Cepos).

22 Juli
Ketua DPRP, Jhon Ibo mengakui jika pelaksanaan program Respek telah mensejahterakan masyarakat di kampung-kampung. Jhon Ibo sendiri mendukung program Respek tersebut (Cepos).

24 Juli
Pemerintah Pusat berjanji akan terus mengawasi perkembangan Otsus di Provinsi Aceh dan Papua. Salah satu usaha Pemerintah Pusat adalah mengoptimalkan Inpres no 5/2007 tentang percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Cepos).

27 Juli
Komisi A DPRP mendesak pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan 7 PP untuk mendukung pelaksanaan Otsus di Papua sesuai UU Otsus no 21 2001 (Cepos).

12 Agustus
Aspirasi pengembalian Otsus dan Refrendum yang disampaikan dalam Mubes MRP ditanggapai oleh pemerintah pusat. Hal itu dibuktikan dengan DPD RI telah membentuk Pansus untuk rekonsiliasi UU Otsus di Papua (Bintang Papua).

13 Agustus
Terbentuknya Pansus dari DPD RI Papua terkait masalah Otsus ditanggapi oleh Wakil Ketua DPRP, Waenand Watory. Menurut Watory, 4 agenda yang dibahas oleh Pansus DPD RI Papua bukanlah menjadi roh dari tuntutan rakyat. Empat agenda tersebut adalah, pengawasan UU Otsus, evaluasi Otsus serta penyempurnaan UU Otsus. Kedua, rekonsiliasi, ketiga, pemekaran kabupaten dan provinsi, ekonomi rakyat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagi Watory, lebih baik memfokuskan pada tuntutan rakyat yakni Otsus dinilai gagal dan mengembalikan Otsus serta membangun dialog bersam (Bintang Papua).

18 Agustus
Gubernur Barnabas Suebu melepaskan 423 pendamping dana Respek ke kampung-kampung (Bintang Papua).

19 Agustus
Mentri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan kenaikan dana Otsus bagi Aceh, Papua dan Papua Barat merupakan bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 3 provinsi ini. Untuk Papua dana Otsus bertambah 3,1 triliun dan Papua Barat 1,3 triliun (Bintang Papua).

30 Agustus
Ketua Democratic center Uncen, Muhamad Abu Musaad mengakui Otsus tahun 2001 tidak relevan dengan dinamika sosial politik yang terjadi di Papua saat kini (Bintang Papua).

1 September
Presiden SBY merasa kuatir akan dana yang cukup besar yang digelontorkan ke Papua namun tidak membawa perubahan pada kualitas hidup masyarakat Papua. Untuk itu diperlukan penanganan khusus atau grand design. Empat kerangka besar yang menimbulkan masalah besar di Papua yang akan ditata adalah strategi pembangunan daerah, kelembagaan pemerintahan daerah, kerangka politik dan HAM (Bintang Papua).

2 September

- John Ibo menilai Presiden SBY lambat menanggapi rencana evaluasi Otsus Papua. Pasalnya UU Otsus dievaluasi setiap 3 bulan. Pada 2005 DPRP telah

Dipindai dengan CamScanner

melakukan evaluasi namun tak ada satupun utusan dari pemerintah pusat yang hadir (Bintang Papua).

- Pemekaran 65 kampung diusulkan lagi. Upaya pemerintah Kabupaten Biak ini berkaitan dengan percepatan pembangunan. Selain dengan mengalokan anggaran khusus untuk masing-masing kampung dalam bentuk Anggaran Belanja dan Pendapatan Kampung. "Pemekaran ini memang sangat penting dalam mempercepat pembangunan, masyarakat juga akan lebih mendapat pelayanan pemerintah (Cepos).

3 September

- Duta Besar Singapura mempertanyakan pelaksanaan otsus di Papua. Pertanyaan ini muncul tatkala ia mengunjungi Wamena dan bertemu dengan Bupati Jayawijaya dan unsur Muspida. Wempi Wetipo, selaku Bupati Jayawijaya menilai pelaksanaan otsus belum ada perhatian serius terhadap wilayah Pegunungan Tengah sehingga masih terbelakang. Sedangkan menyangkut investasi, wilayah pegunungan memiliki potensi Kopi dan pariwisata (Cepos).

- UU Otsus dinilai gagal sehingga KNPB dan SKMBN-S menolak revisi Otsus. Penolakan tersebut dibuktikan dengan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Kabupaten Biak dan menuntut diadakannya dialog antara Pemerintah RI dengan masyarakat Papua. Selain itu mereka juga menilai Otsus gagal dan menolak revisi atasnya. Ada enam poin pernyataan sikap yang diserahkan kepada DPRD. Pertama, menolak kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengacaukan persatuan dan kesatuan bangsa Papua. Kedua, menolak dialog Jakarta-Papua. Ketiga, Pemerintah RI agar segera

Dipindai dengan CamScanner

membuka ruang demokrasi yang jujur dan adil kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan pendapat tentang sejarah politik pada tahun 1961-1962 dan pepera 1969 yang cacat hukum. Keempat, pemerintah RI segera menyelesaikan status politik bangsa Papua dengan melibatkan pihak ketiga yaitu PBB melalui forum yang bermatabat, adil dan jujur untuk bangsa Papua dalam menentukan nasib sendiri. Kelima, pemerintah RI segera menyelesaikan pelangggaran HAM, pengrusakan lingkungan hidup, hukum, sosial, politik, budaya dan ekonomi di Papua Barat sejak 1960-2010. Keenam, UU otsus gagal total dan menolak usaha revisi atasnya (Cepos).

24 September

Masalah Papua dibahas di kongres AS. Sementara itu Amerika Serikat meneyerukan kepada Indonesia untuk terus maju dengan otonomi khusus di Papua dan mendesak agar tidak akan mengabaikan Hak Asasi Manusia di Papua. Amerika Serikat menggangap dugaan pelanggaran HAM di Papua sangat serius. Eny Faleomavaega mengungkapkan bahwa ini merupakan fakta tak terbantahkan bahwa Indonesia telah dengan sengaja dan sistematis melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan belum bertanggung jawab (Bintang Papua).

9 Oktober

Pendeta Socrates Yoman mengatakan bahwa pelaksanaan UU no 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus belum dirasakan kekhususannya. Hal ini dikarenakan keberpihakan terhadap orang asli Papua belum ada. Selain itu pula, pelaksanaan otsus tidak konsisten dan konsekuen. Misalnya dalam pemilukada, bupati atau wakil bupati harus orang daerah tapi kenyataannya ada yang bukan orang asli (Bintang Papua).

Dipindai dengan CamScanner

1 Oktober

Berbagai penilain terkait otonomi khusus Papua. Menurut Mentri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto bahwa tidak semua program Otsus gagal namun ada yang berhasil. Pernyataan ini disampaikan oleh Djoko dalam acara dialog atau tatap muka dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat di Manokwari pada Kamis (30/9) (Kompas).

1 November

- Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua mendukung agar KPK mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otsus dari hasil temuan BPK sekitar 587 miliar (Bintang Papua).

- Bupati Habel Suwae mengungkapkan bahwa total dana Otsus yang diterima Kabupaten Jayapura dari tahun 2002 – 2010 mencapai 430,963 miliar (Cepos).

3 November

Indikasi korupsi dana Otsus Papua sebesar 587 miliar sepanjang tujuh tahun anggaran bukan merupakan hal yang baru. BPK RI pernah melaporkan temuan korupsi dana Otsus namun pelaku dari korupsi tersebut sulit terungkap ke publik (Bintang Papua).

5 November

- Kegiatan fisik Bidang Tanaman Pangan dan Holtukultura dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Keerom yang dibiayai oleh dana Otsus sebesar 500 juta telah selesai dikerjakan pada Oktober yang lalu (Cepos).
- Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu mempertanyakan komitmen DPR Papua dalam penolakan Otsus sesuai hasil Mubes yang diakomodir

Dipindai dengan CamScanner

dalam demo damai di Kantor MRP 8-9 Juli yang lalu (Bintang Papua).

6 November

- Panitia Khusus Judical Review terhadap UU Otsus DPRP direncanakan hari ini ke Jakarta untuk menuntaskan agenda judical review yang diperjuangkan oleh DPRP dan DPR Papua Barat (Cepos).
- Kebijakan Gubernur Papua mengalokasikan dana Otsus kepada lembaga-lembaga keagamaan di Papua mendapat sorotan dari Ketua DAP daerah Kepulauan Yapen, Apolos Mora. Menurut Apolos kebijakan gubernur tersebut sebagai tindakan diskriminatif terhadap hukum adat dan para pemangku adat di tanah yang memiliki otoritas di tanah adat dan seumber daya alam di Papua Barat (Bintang Papua).

8 November

- Pejabat Bupati Tolikara, Washinton Turnip mengatakan PNPM Mandiri dan Respek memiliki peran dan arti sangat penting dan strategis dalam membangun masyarakat di Kabupaten Tolikara (Cepos).
- Dewan Perwakilan Rakyat Papua membentuk Pansus Yudical Reveiw ke Mahkama Konstitusi untuk mengkaji ulang UU Otsus Pasal 7 huruf a: DPRP mempunyai wewenang memilih gubernur (Bintang Papua).

11 November

- Gubernur Papua Barnabas Suebu meminta kepada BPK untuk menindaklanjuti ke proses hukum tentang indikasi sejumlah penemuan terkait penyimpangan dana Otsus yang mencapai 875 miliar (Bintang Papua).
- Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Dipindai dengan CamScanner

Provinsi Papua, Marthen Tangaran, program Respek mampu mengurangi arus urbanisasi dari desa ke kota (Cepos).

19 November

- Bupati Wamena Wempi Wetipo mengatakan program Respek di Jayawijaya sejauh ini belum sepenuhnya maksimal karena sampai saat ini belum pernah Pemkab Jayawijaya menerima laporan mengenai realisasi program Respek (Cepos).
- Panitia Khusus Judical Review DPRP dan DPR Papua Barat terus menyiapkan beberapa hal dalam menyusun materi gugatan atau uji material terhadap UU Otsus terutama Pasal 7 huruf a tentang Pemilihan Gubernur Papua melalui DPRP ke MK (Cepos).

20 November

Sekelompok massa melakukan aksi demo di Kantor DPRP, mereka mendesak DPRP untuk segera menggelar paripurna penolakan Otsus Papua (Bintang Papua).

25 November

Aspirasi penolakan Otsus menjadi perhatian serius oleh Duta Besar Inggris, Mathin Hatfull ketika berkunjung ke Papua. Kedatangan Martin Hatfull dan 2 stafnya untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai semua perkembangan di Papua terkait perkembangan politik dan perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Cepos).

26 November

- Kepala Badan Pemberdayaan Masyrakat Mimika, Altikal L Patulak meminta kasus hilangnya dana Respek di Kampung Kadun Jaya sebesar 55 juta serius diselidiki (Cepos).
- Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral

Dipindai dengan CamScanner

Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia, Ade Komarudin meminta kepada kader SOKSI Provinsi Papua mengawal dana Otsus sehingga benar-benar sampai di masyarakat (Cepos).

27 November
Kepala BPKP Perwakilan Papua, I Nyoman Sardiana mengatakan peluang korupsi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi karena dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui dana Otsus begitu besar (Cepos).

29 November
Panitia khusus Judicial Review UU Otsus DPRP mempresentasikan draft materi judicial review di hadapan fraksi, komisi dan anggota DPRP sebelum diserahkan ke MK (Cepos).

2 Desember
DPR Pusat mengadakan pertemuan untuk membahas Otsus Papua dan Aceh. Pertemuan ini menghadirkan 11 kementrian (Cepos).

8 Desember
Pemerintah berencana mengakhiri pemberian dana Otsus untuk Papua dan Aceh melalui pengurangan secara bertahap, pemberian dana Otsus rencananya diakhiri pada tahun 2022 (Cepos).

13 Desember
Draf judicial review UU Otsus yang telah dipelajari, diserahkan oleh tim pengacara kepda MK di Jakarta pada hari Jumat, 10 Desember yang lalu (Bintang Papua).

14 Desember
Dana Respek selama 2 tahun anggaran bagi Kota Jayapura

Dipindai dengan CamScanner